

**EVALUASI PENYALURAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN  
(PKH) TERHADAP MASYARAKAT MISKIN  
DI KABUPATEN PIDIE**

**SKRIPSI**

**Diajukan oleh:  
ZAHIRA SAFFA  
NIM. 220802095**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
TAHUN 2026**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zahira Saffa  
Nim : 220802095  
Program studi : Ilmu Administrasi Negara  
Tempat/tanggal lahir : Sigli, 21 Maret 2004  
Alamat : Aron Kuta Baro, Kecamatan Kembang  
Tanjung, Kabupaten Pidie

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap makalah orang lain.
3. Tidak menggunkan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang telah berlaku di fakultas ilmu sosial dan ilmu pemerintahan uin ar-raniry banda aceh. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 12 Mei 2026



Yang Menyatakan,

Zahira Saffa  
NIM. 220802095

**LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING**

**Evaluasi Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Masyarakat  
Miskin Di Kabupaten Pidie**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
(S-1) Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

**Zahira Saffa**

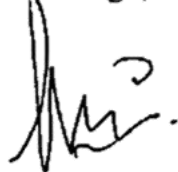
NIM. 220802095

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

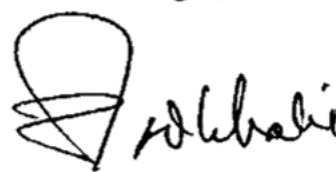
Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



**Ferry Setiawan, SE,M.Si**  
NIP. 197802032005041001

Pembimbing II,



**Zakki Fuad Khalil,M.SI.**  
NIP. 199011192022031001

**LEMBAR PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH**


**Evaluasi Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Masyarakat  
Miskin Di Kabupaten Pidie**

Zahira Saffa  
NIM. 220802095


Telah di Uji oleh Panitia Munaqasyah Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu  
Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 12 Mei 2026  
Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua

  
Ferry Setiawan, S.E.,AK.,M.Si  
NIP. 197802032005041001


Sekretaris

  
Zakki Fuad Khalil, M.Si.  
NIP. 199011192022031001

Penguji I

  
Muazzinah, B.Sc., MPA.  
NIP. 198411252019032012

Penguji II

  
Mardani Malemi, S.Fil., M.A.P  
NIP. 197303262005011003

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Prof. Dr. Muji Multa, M. Ag.  
NIP. 197403271999031005

## ABSTRAK

Kemiskinan masih menjadi permasalahan mendasar di Indonesia, termasuk di Kabupaten Pidie yang memiliki tingkat kemiskinan relatif tinggi di Provinsi Aceh, sehingga mendorong pemerintah untuk menghadirkan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya penanggulangan kemiskinan melalui bantuan sosial bersyarat; namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala seperti ketidaktepatan sasaran, keterlambatan penyaluran, dan kelemahan pengawasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penyaluran PKH di Kabupaten Pidie dengan fokus pada mekanisme distribusi, ketepatan sasaran, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, dengan informan dari Dinas Sosial, pendamping PKH, aparatur desa, serta masyarakat penerima dan non-penerima manfaat, sedangkan analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di Kabupaten Pidie secara umum telah berjalan cukup efektif dan efisien, ditandai dengan mekanisme distribusi yang sistematis serta pencairan bantuan yang relatif tepat waktu, serta memberikan dampak positif dalam mengurangi beban ekonomi masyarakat, khususnya pada sektor pendidikan dan kesehatan; namun demikian, masih terdapat kendala dalam aspek ketepatan sasaran dan pemerataan yang dipengaruhi oleh keterbatasan kuota serta ketidakakuratan data penerima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa PKH telah berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, namun masih memerlukan perbaikan pada aspek pendataan, pengawasan, dan akurasi sasaran agar pelaksanaannya lebih optimal dan berkelanjutan.

*Kata kunci: Program Keluarga Harapan, kemiskinan, evaluasi kebijakan.*

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

## KATA PENGANTAR


Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “*Evaluasi Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Masyarakat Miskin di Kabupaten Pidie*”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

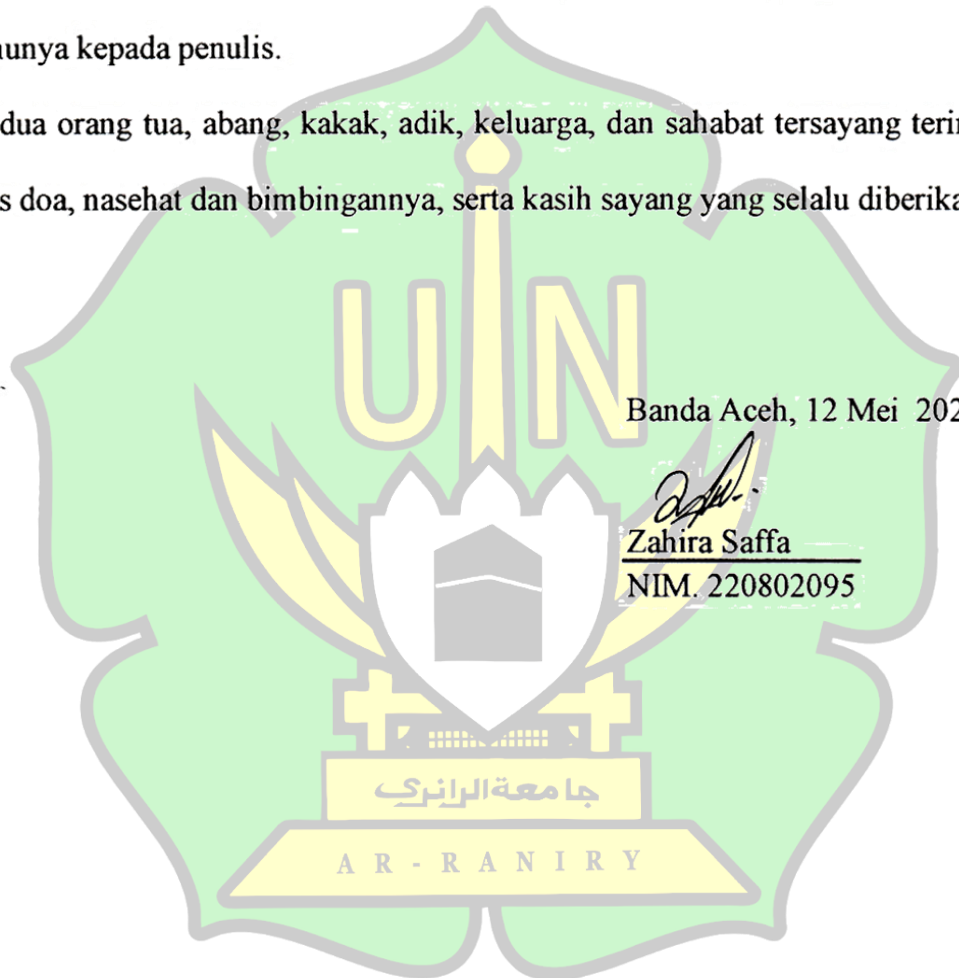
Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai kendala dan keterbatasan. Namun, berkat bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ibu Muazzinah, M.P.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Zakki Fuad Khalil, M.SI., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh
5. Zakki Fuad Khalil, M.SI., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran, masukan dan motivasi dalam pembuatan proposal ini.

6. Bapak Ferry Setiawan, SE,M.Si., Bapak Zakki Fuad Khalil,M.S., selaku dosen pembimbing tugas akhir.
7. Segenap seluruh dosen di lingkungan Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
8. Kedua orang tua, abang, kakak, adik, keluarga, dan sahabat tersayang terima kasih atas doa, nasehat dan bimbingannya, serta kasih sayang yang selalu diberikan.

Banda Aceh, 12 Mei 2026

  
Zahira Saffa  
NIM. 220802095



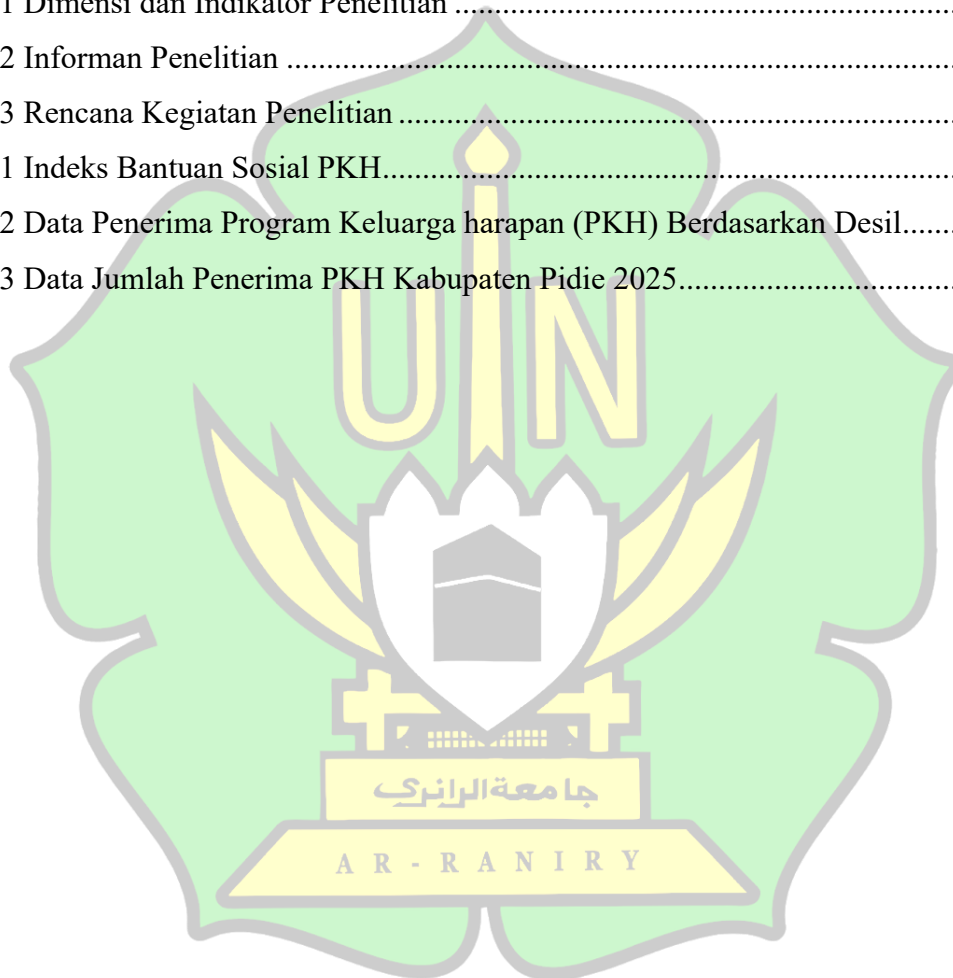
## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	12
1.3 Rumusan Masalah.....	12
1.4 Tujuan Penelitian.....	12
1.5 Manfaat Penelitian.....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
2.1 Penelitian Terdahulu.....	14
2.2 Teori Evaluasi Kebijakan Publik.....	19
2.2.1 Pengertian Teori Evaluasi Kebijakan Publik.....	19
2.3 Program Keluarga Harapan (PKH).....	21
2.4 Konsep Evaluasi Program.....	23
2.5 Kemiskinan dan Penanggulangannya.....	25
2.6 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi pelaksanaan PKH.....	26
2.7 Kerangka Berpikir.....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>30</b>
3.1 Lokasi Penelitian.....	30
3.2 Jenis Penelitian.....	30
3.3 Fokus Penelitian.....	31
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	33

3.5	Informan Penelitian .....	34
3.6	Sumber Data .....	35
3.7	Teknik Analisis Data.....	36
3.8	Jadwal Penelitian .....	37
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>38</b>
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	38
4.1.1	Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Pidie .....	39
4.1.2	Struktur Organisasi.....	40
4.2	Hasil Penelitian.....	41
4.2.1	Efektivitas ( <i>Effectiveness</i> ) .....	42
4.2.2	Efisiensi ( <i>Efficiency</i> ) .....	45
4.2.3	Kecukupan ( <i>Adequacy</i> ).....	49
4.2.4	Pemerataan ( <i>Equity</i> ) .....	50
4.2.5	Responsivitas ( <i>Responsiveness</i> ) .....	55
4.2.6	Ketepatan ( <i>Appropriateness</i> ).....	58
4.3	Pembahasan .....	62
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>65</b>
5.1	Kesimpulan.....	65
5.2	Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>68</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>		<b>75</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persentase Penduduk miskin di Provinsi Aceh pada Tahun 2022-2025. ....	3
Tabel 1.2 Data Penerima PKH di Kabupaten Pidie Tahun 2021-2025.....	7
Tabel 2.1 Indikator Teori Evaluasi Kebijakan Publik.....	20
Tabel 3.1 Dimensi dan Indikator Penelitian .....	31
Tabel 3.2 Informan Penelitian .....	34
Tabel 3.3 Rencana Kegiatan Penelitian .....	37
Tabel 4.1 Indeks Bantuan Sosial PKH.....	41
Tabel 4.2 Data Penerima Program Keluarga harapan (PKH) Berdasarkan Desil.....	47
Tabel 4.3 Data Jumlah Penerima PKH Kabupaten Pidie 2025.....	54



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Dinas Sosial Kabupaten Pidie.....	38
Gambar 4.2 Struktur Organisasi.....	40
Gambar 4.3 Alur Penetapan Penerima PKH.....	52



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan Pembimbing.....	75
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian.....	76
Lampiran 3 Dokumentasi.....	77



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan di Indonesia masih menjadi persoalan mendasar yang bersifat struktural dan berpengaruh besar terhadap pembangunan sosial maupun ekonomi. Berbagai program bantuan dari pemerintah memang sudah dijalankan pemerintah, namun pada kenyataannya tingkat kemiskinan di beberapa daerah, terutama di wilayah pedesaan, masih cukup tinggi dan rentan. Kondisi ini menjadi lebih rumit karena Indonesia terdiri dari banyak pulau dengan kondisi wilayah, kehidupan sosial, dan budaya yang berbeda-beda. Sehingga upaya untuk mengurangi kemiskinan tidak bisa disamakan di semua daerah, tetapi harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah.<sup>1</sup> Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang adaptif dan kontekstual. Pendekatan adaptif memungkinkan kebijakan menyesuaikan diri terhadap perubahan ekonomi dan sosial, sehingga tetap relevan dengan kondisi terkini. Sementara itu, pendekatan kontekstual memastikan kebijakan disusun sesuai dengan kondisi, budaya, dan potensi lokal.

Di Provinsi Aceh, upaya pengentasan kemiskinan masih menghadapi berbagai tantangan. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi wilayah dan kebiasaan masyarakat

---

<sup>1</sup> Komang Ema Marsitadewi and I Wayan Sudemen, "Pola Intervensi Pemerintah Melalui Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia," *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora* 9, no. 1 (2025): 68–77.

setempat. Aceh memiliki wilayah yang cukup luas dengan kondisi alam yang berbeda-beda, sehingga pembangunan belum merata di semua daerah. wilayah pedalaman masih mengalami keterbatasan infrastruktur, seperti jalan, sarana transportasi, dan akses komunikasi, yang menyebabkan sulitnya masyarakat memperoleh layanan dasar. Selain itu, sebagian besar penduduk masih menggantungkan hidup pada sektor pertanian tradisional yang sangat dipengaruhi oleh perubahan cuaca dan naik turunnya harga hasil pertanian.

Nilai adat turut memengaruhi partisipasi dalam program pemerintah. Kualitas sumber daya manusia, terutama pendidikan dan keterampilan masih rendah.<sup>2</sup> Akibatnya, Kemiskinan di Aceh tidak hanya terjadi karena pendapatan masyarakat yang rendah, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai kendala, seperti faktor struktural, budaya, dan kondisi wilayah. Akses masyarakat terhadap pendidikan dan lapangan pekerjaan masih terbatas, ditambah lagi banyak daerah yang sulit dijangkau sehingga memperbesar kesenjangan perekonomian. Selain itu, sebagian masyarakat masih memiliki sikap pasrah dan bergantung pada bantuan pemerintah, yang membuat kondisi kemiskinan terus berulang dan sulit untuk diatasi hingga saat ini.

---

<sup>2</sup> Dara Angreka Soufyan, "ACEH DAN TANTANGAN KEMISKINAN: MENELAHAH PERAN PDRB DAN IPM," *JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI* VOLUME 15 (2025): 15–31.

**Tabel 1.1 Persentase Penduduk miskin dan Total Penduduk di Provinsi Aceh pada Tahun 2022-2024.**

No	Kabupaten	2022		2023		2024	
1	Kab Aceh Singkil	130.800	19,18%	126.500	19,15%	135.700	19,06%
2	Kab Pidie	443.555	18,79%	448.085	18,78%	453.200	18,59%
3	Kab Gayo Lues	103.100	18,87%	99.500	18,82%	106.600	18,30%
4	Kab Pidie Jaya	162.800	18,45%	158.400	18,40%	166.500	18,28%
5	Kab Bener Meriah	168.700	18,39%	161.300	18,31%	172.000	18,18%
6	Kab Simeulu	94.900	18,37%	92.900	17,92%	98.600	17,59%
7	Kab Aceh Barat	202.900	17,93%	198.700	17,86%	206.700	17,60%
8	Kab Nagan Raya	173.400	17,38%	168.400	17,25%	176.900	16,94%
9	Kota Subussalam	95.200	16,94%	90.800	16,41%	100.100	16,38%
10	Kab Aceh Utara	614.600	16,86%	602.800	16,64%	742.700	16,11%
11	Kab Bireun	443.900	12,51%	436.400	12,12%	459.100	12,10%
12	Kab Aceh Jaya	96.000	12,51%	93.200	12,42%	94.700	12,25%
13	Kab Aceh Selatan	237.400	12,43%	232.400	12,10%	242.000	12,02%
14	Kab Aceh Timur	432.800	13,91%	422.400	13,39%	443.600	13,26%
15	Kab Aceh Tenggara	228.300	12,83%	220.900	12,45%	234.400	11,99%
16	Kab Aceh Tengah	215.600	14,50%	215.600	14,38%	206.300	14,27%
17	Kab Aceh Besar	414.500	13,38%	405.500	13,38%	428.300	13,21%
18	Kab A. Barat Daya	155.000	15,44%	150.800	15,43%	159.200	15,32%
19	Kab Aceh Tamiang	301.500	12,61%	294.400	12,51%	304.000	12,17%
20	Kota Banda Aceh	257.600	7,13%	252.900	7,04%	265.000	6,95%
21	Kota Langsa	92.600	10,62%	186.000	10,53%	198.400	10,33%
22	Kota Lhokseumawe	191.400	10,84%	188.700	10,73%	200.400	10,44%
23	Kota Sabang	43.200	14,66%	41.200	14,59%	43.500	14,58%

*Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025 (Provinsi Aceh) Diolah Peneliti.*

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa persentase penduduk miskin di Provinsi Aceh pada tahun 2022–2024 menunjukkan kecenderungan menurun di hampir seluruh kabupaten/kota. Data tersebut juga memperlihatkan jumlah penduduk pada masing-masing daerah yang terus mengalami perubahan setiap tahunnya.

Kabupaten Aceh Singkil menjadi daerah dengan persentase penduduk miskin tertinggi selama periode 2022–2024. Pada tahun 2022 persentase penduduk miskin di daerah tersebut mencapai 19,18%, kemudian sedikit menurun menjadi 19,15% pada

tahun 2023 dan kembali turun menjadi 19,06% pada tahun 2024. Sementara itu, Kabupaten Pidie berada pada urutan kedua dengan persentase kemiskinan sebesar 18,79% pada tahun 2022, menurun menjadi 18,78% pada tahun 2023, dan kembali turun menjadi 18,59% pada tahun 2024.

Beberapa daerah lain yang juga memiliki tingkat kemiskinan relatif tinggi yaitu Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bener Meriah, dan Kabupaten Simeulue dengan persentase kemiskinan di atas 17% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah-wilayah tersebut masih menghadapi permasalahan kesejahteraan masyarakat yang cukup serius dibandingkan daerah lain di Aceh.

Di sisi lain, Kota Banda Aceh menjadi daerah dengan persentase penduduk miskin terendah selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022 persentase kemiskinan di Kota Banda Aceh sebesar 7,13%, kemudian menurun menjadi 7,04% pada tahun 2023 dan kembali turun menjadi 6,95% pada tahun 2024. Selain Kota Banda Aceh, Kota Langsa dan Kota Lhokseumawe juga termasuk daerah dengan tingkat kemiskinan relatif rendah dibandingkan kabupaten lainnya.<sup>3</sup>

Jika dilihat dari jumlah penduduk, Kabupaten Aceh Utara merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbesar. Pada tahun 2022 jumlah penduduknya mencapai 614.600 jiwa, meningkat menjadi 602.800 jiwa pada tahun 2023, dan kembali meningkat menjadi 742.700 jiwa pada tahun 2024. Sementara itu, Kota Sabang

---

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, "Jumlah Penduduk Aceh Berdasarkan Kabupaten/Kota," 2025, <https://data.acehprov.go.id/dataset/74bea426-69aa-4a63-a474-2d4962dff34f/resource/7add250f-8a85-4f67-9f9a-f7d84570b775/download/jumlah-pendudukribu-menurut-kabupatenkota-di-provinsi-aceh.csv>.

menjadi daerah dengan jumlah penduduk paling sedikit, yaitu sekitar 43 ribu jiwa selama periode penelitian.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu instrumen utama pemerintah dalam memperkuat jaring pengaman sosial dengan memberikan bantuan bersyarat kepada keluarga miskin. Melalui program ini, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak hanya memperoleh bantuan finansial, tetapi juga didorong untuk memenuhi kewajiban tertentu, seperti memastikan anak tetap bersekolah serta memanfaatkan layanan kesehatan.<sup>4</sup> Dengan mekanisme tersebut, Program Keluarga Harapan (PKH) tidak hanya berfungsi sebagai bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga diharapkan dapat mendorong perubahan perilaku ke arah yang lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup serta sumber daya manusia penerimanya.

Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 1 Tahun 2018 menjadi landasan hukum utama dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia. Regulasi ini mengatur secara komprehensif mengenai tujuan, sasaran, mekanisme, dan tata kelola pelaksanaan PKH, termasuk ketentuan tentang kriteria keluarga penerima manfaat, besaran bantuan, serta peran berbagai pihak yang terlibat, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pendamping sosial.<sup>5</sup> Permensos juga menegaskan bahwa PKH merupakan program bantuan sosial bersyarat yang bertujuan

---

<sup>4</sup> Putri Agustin Pakaya, Tety Thalib, and Andi Yusuf Katili, "Mekanisme Pendataan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Biawu Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo," *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 2793–2800.

<sup>5</sup> Menteri Sosial Republik Indonesia, "PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018" 3, no. 32 (2018): 1–44.

untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin melalui akses yang lebih baik terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Dengan adanya peraturan ini, penyelenggaraan PKH memiliki dasar hukum yang kuat sehingga dapat dilaksanakan secara terarah, transparan, dan akuntabel di seluruh wilayah Indonesia.

Kabupaten Pidie merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yang menghadapi tantangan serius dalam penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan data tahun 2024, tingkat kemiskinan di Kabupaten Pidie mencapai 18,59 persen, angka yang jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi Aceh (12,64 persen) maupun nasional (8,57 persen). Kondisi ini menempatkan Kabupaten Pidie sebagai salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Aceh.<sup>6</sup> Menyadari kompleksitas permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pidie melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) telah meluncurkan Peta Digital Spasial Kantong Kemiskinan Kabupaten Pidie 2024 pada Oktober 2024.<sup>7</sup> Peta digital ini sangat penting karena dapat membantu mengetahui dengan jelas lokasi dan kondisi daerah-daerah yang masih mengalami kemiskinan. Dengan adanya peta ini, pelaksanaan program bantuan dapat dilakukan dengan lebih tepat sasaran dan hasilnya menjadi lebih efektif.

Pemerintah Kabupaten Pidie juga mengimplementasikan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dengan tiga strategi utama, yaitu: (1) pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui

---

<sup>6</sup> Misran Asri, "Pidie Menjadi Pusat VKN LAN Angkatan XXIV, Bawa Pesan Membangun Desa Untuk Pemerataan Ekonomi," PROHABA.CO, 2025.

<sup>7</sup> Nur Hidayati, "Bappeda Lauching Peta Digital Spasial Kantong Kemiskinan Kabupaten Pidie 2024," Serambi News, 2024.

program bantuan sosial seperti PKH; (2) peningkatan pendapatan masyarakat melalui program pemberdayaan ekonomi; dan (3) penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan melalui pendekatan spasial dan kolaborasi lintas sektor.<sup>8</sup> Agar penanganan kemiskinan lebih terarah dan tepat sasaran, upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan dan menyeluruh.

**Tabel 1.2 Data Penerima PKH di Kabupaten Pidie Tahun 2021-2024**

No	Tahun	Total Penduduk	Total Masyarakat Miskin	Penerima Manfaat PKH	Anggaran
1.	2021	438.976	88.530	34.043	251.918.200.000
2.	2022	443.555	85.870	28.213	208.776.200.000
3.	2023	448.085	86.790	29.239	216.368.600.000
4.	2024	453.200	86.890	34.354	254.219.600.000

*Sumber data : Oleh Dinas Sosial Kabupaten Pidie*

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat diketahui bahwa perkembangan jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pidie selama tahun 2021–2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021 jumlah penduduk Kabupaten Pidie tercatat sebanyak 438.976 jiwa dengan jumlah masyarakat miskin mencapai 88.530 jiwa. Dari jumlah tersebut, penerima manfaat Program Keluarga Harapan (KPM) tercatat sebanyak 34.043 jiwa dengan total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp251.918.200.000.

<sup>8</sup> Bappeda pidie, “Kepala Bappeda Pidie H. Isnaini, ST, M. Si Gelar Rakor TKPKD 2024,” seputaraceh.id, 2024.

Pada tahun 2022 jumlah penduduk meningkat menjadi 443.555 jiwa. Namun, jumlah masyarakat miskin mengalami penurunan menjadi 85.870 jiwa. Penurunan juga terjadi pada jumlah penerima manfaat PKH, yaitu menjadi 28.213 jiwa dengan total anggaran sebesar Rp208.776.200.000. Kondisi ini menunjukkan adanya pengurangan jumlah penerima bantuan sosial dibandingkan tahun sebelumnya.<sup>9</sup>

Selanjutnya, pada tahun 2023 jumlah penduduk kembali meningkat menjadi 448.085 jiwa, sedangkan jumlah masyarakat miskin mengalami kenaikan menjadi 86.790 jiwa. Jumlah penerima manfaat PKH juga meningkat menjadi 29.239 jiwa dengan anggaran sebesar Rp216.368.600.000. Peningkatan ini menunjukkan adanya penyesuaian jumlah penerima bantuan terhadap kondisi masyarakat miskin di Kabupaten Pidie.

Pada tahun 2024 jumlah penduduk Kabupaten Pidie mencapai 453.200 jiwa dengan jumlah masyarakat miskin sebanyak 86.890 jiwa. Jumlah penerima manfaat PKH meningkat cukup signifikan menjadi 34.354 jiwa. Sejalan dengan hal tersebut, anggaran PKH juga mengalami peningkatan menjadi Rp254.219.600.000, yang merupakan jumlah anggaran terbesar selama periode penelitian.

Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Pidie terus mengalami peningkatan setiap tahun, sedangkan jumlah masyarakat miskin dan penerima manfaat PKH cenderung berfluktuasi. Perubahan jumlah penerima manfaat PKH turut memengaruhi besarnya anggaran yang dialokasikan pemerintah. Hal ini

---

<sup>9</sup> Aceh, "Jumlah Penduduk Aceh Berdasarkan Kabupaten/Kota."

mengindikasikan bahwa Program Keluarga Harapan masih menjadi salah satu instrumen penting pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pidie.

Peningkatan atau penurunan jumlah penerima PKH umumnya mencerminkan dinamika jumlah keluarga yang terdaftar sebagai miskin/rentan dalam DTKS. Penurunan jumlah penerima sering kali terkait dengan penurunan tingkat kemiskinan atau pembaruan data yang lebih akurat, sedangkan peningkatan jumlah penerima bisa terjadi ketika lebih banyak keluarga masuk kategori miskin/rentan atau data DTKS mencatat lebih banyak keluarga yang membutuhkan bantuan sosial.<sup>10</sup> Oleh karena itu perubahan jumlah penerima PKH juga tidak terlepas dari kebijakan pemerintah pusat maupun daerah dalam melakukan perluasan atau penajaman sasaran bantuan sosial.

Evaluasi dan verifikasi Program Keluarga Harapan (PKH) dilakukan secara rutin setiap tiga bulan oleh pendamping untuk memastikan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) masih memenuhi syarat dan menjalankan kewajiban di bidang pendidikan dan kesehatan sebelum bantuan dicairkan. Proses ini mencakup pengecekan kehadiran anak di sekolah, pemeriksaan kesehatan ibu dan balita, serta pembaruan data jika ada perubahan kondisi keluarga. Pelaksanaan evaluasi berkala ini juga diatur dalam pedoman resmi Kementerian Sosial, sehingga menjadi bagian dari mekanisme resmi

---

<sup>10</sup> Widyaningsih, Dyan, (2022) 'Mendorong Pemutakhiran Berkelanjutan terhadap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.' SMERU Working Paper No. 1. Jakarta: The SMERU Research Institute.

penyaluran bantuan agar tetap tepat sasaran dan transparan.<sup>11</sup> Dengan adanya aturan tersebut, evaluasi berkala bukan hanya menjadi praktik di lapangan, tetapi juga bagian resmi dari sistem pengelolaan PKH dan benar-benar mendorong peningkatan kesejahteraan keluarga penerima.

Namun dalam pelaksanaannya, berbagai penelitian menunjukkan bahwa PKH masih menghadapi sejumlah permasalahan, seperti ketidaktepatan sasaran penerima, keterlambatan dalam penyaluran, serta kelemahan pada aspek pengawasan. Hasil evaluasi di beberapa desa juga mengungkapkan bahwa proses distribusi bantuan belum berjalan efisien, bahkan masih terdapat rumah tangga miskin yang belum memperoleh akses bantuan secara optimal.<sup>12</sup> Hal ini mencerminkan bahwa efektivitas PKH belum sepenuhnya tercapai, sehingga diperlukan perbaikan mekanisme dan penguatan koordinasi antarinstansi agar program dapat berjalan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Meskipun sudah ada banyak penelitian tentang evaluasi PKH di berbagai daerah di Indonesia, masih sangat sedikit penelitian yang secara khusus membahas bagaimana mekanisme penyaluran, ketepatan sasaran, dan dampak ekonomi maupun sosial PKH di Kabupaten Pidie.<sup>13</sup> Penelitian ini menjadi penting, karena ada faktor lokal yang bisa

---

<sup>11</sup> Sari, L., Sugianor, & Munawarah. (2025). Evaluasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pengentasan kemiskinan di Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi kasus Desa Hambuku Lima dan Desa Sungai Durait Hulu). *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol.2, No. 1.

<sup>12</sup> I Kadek Dwi Rizky Diputra, Komang Adi Sastra Wijaya, and I Dewa Ayu Putri Wirantari, "Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Tabanan (Studi Kasus Di Kecamatan Tabanan)," *Socio-Political Communication and Policy Review* 2, no. 4 (2025): 1–14, <https://doi.org/10.61292/shkr.261>.

<sup>13</sup> Nur Aeda and Riadul Jannah, "Implementasi Dan Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. Studi Di Desa Kekait Kecamatan Gunungsari

menjadi pengaruh keberhasilan program, seperti akurasi data penerima (DTKS), koordinasi antarinstansi, kemampuan pendamping PKH, Kondisi wilayah dan lingkungan setempat sangat mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Jika tidak dilakukan penelitian di tingkat daerah, kebijakan yang disusun biasanya hanya bersifat umum dan belum tentu sesuai dengan kebutuhan serta kondisi nyata di Kabupaten Pidie. Akibatnya, kebijakan tersebut sulit diterapkan secara efektif.

Sejalan dengan hal tersebut, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di sejumlah wilayah Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama dalam ketepatan sasaran penerima, ketepatan waktu penyaluran bantuan, serta lemahnya pengawasan di lapangan, yang pada akhirnya berdampak pada efektivitas program dalam mengentaskan kemiskinan. Penelitian di wilayah Aceh, khususnya Kabupaten Pidie jaya, mengungkapkan masih ditemukannya ketidakakuratan data penerima manfaat, sehingga diperlukan verifikasi dan pemutakhiran data secara berkala agar bantuan PKH dapat tepat sasaran. Temuan ini mengindikasikan pentingnya penelitian serupa di Kabupaten Pidie untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan PKH sesuai dengan karakteristik daerah setempat.

Berdasarkan masalah yang dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang hal ini dengan mengambil judul **“Evaluasi Penyaluran**

## **Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Masyarakat Miskin Di Kabupaten Pidie”**

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pidie menghadapi berbagai kendala, seperti ketidaktepatan sasaran penerima, keterlambatan penyaluran bantuan, dan kelemahan pengawasan di lapangan. ketidaktepatan sasaran penerima masih menjadi persoalan utama yang dipengaruhi oleh ketidakakuratan dan belum optimalnya pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Akibatnya, masih ditemukan keluarga miskin yang seharusnya menerima bantuan namun belum terakomodasi, sementara sebagian penerima lainnya dinilai kurang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

### **1.3 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana evaluasi penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pidie dalam hal mekanisme distribusi, ketepatan sasaran, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat miskin?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Untuk mengevaluasi penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pidie dalam hal mekanisme distribusi, ketepatan sasaran, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat miskin.

## 1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu administrasi negara, khususnya dalam evaluasi kebijakan publik di bidang perlindungan sosial.
  - b. Memperkaya literatur mengenai efektivitas program bantuan sosial bersyarat di daerah pedesaan, terutama dengan kasus spesifik Kabupaten Pidie.
2. Manfaat Praktis
  - a. Menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Pidie, Dinas Sosial, dan pendamping PKH dalam memperbaiki mekanisme penyaluran bantuan agar lebih tepat sasaran dan efisien.
  - b. Memberikan rekomendasi yang sesuai dengan kondisi lokal Pidie, sehingga kebijakan tidak hanya bersifat umum, tetapi juga operasional dan kontekstual.
  - c. Mendukung perumusan strategi pengentasan kemiskinan yang lebih efektif dengan memanfaatkan hasil evaluasi di lapangan

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

1. Taufik, Khairunnisa, dan Said Amirulkamar (2025). “Bantuan Sosial Menjadi Ketergantungan: Evaluasi Dampak Program Keluarga Harapan di Kabupaten Pidie Jaya”. meneliti pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bandar Dua dengan fokus pada akurasi data penerima manfaat dan dampaknya terhadap kemandirian ekonomi keluarga miskin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara mendalam, observasi lapangan, serta telaah dokumen. Analisis data dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi permasalahan berulang dan faktor-faktor penyebabnya. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaktepatan sasaran penerima akibat lemahnya mekanisme pemutakhiran data dan verifikasi, serta munculnya ketergantungan penerima terhadap bantuan yang menghambat proses kemandirian ekonomi.<sup>14</sup> **Gap penelitian** adalah perlunya kajian lanjutan yang menilai keberlanjutan program dan efektivitas komponen pemberdayaan dalam mendorong transisi penerima manfaat dari ketergantungan menuju kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.
2. Baiti Jannati dan Wahyu Subadi (2022). “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Talan Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong” penelitian ini

---

<sup>14</sup> Said Amirulkamar, “Bantuan Sosial Menjadi Ketergantungan : Evaluasi Dampak Program Keluarga Harapan Di Kabupaten Pidie Jaya” 8, no. 2 (2025): 686–700.

menilai sejauh mana efektivitas pelaksanaan PKH dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat miskin di Desa Talan, Kabupaten Tabalong. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap lima informan, yaitu aparat desa, kader PKH, serta penerima bantuan. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di Desa Talan belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat ketidaktepatan sasaran penerima bantuan, keterbatasan sumber daya manusia, serta partisipasi masyarakat yang rendah.<sup>15</sup> **Gap penelitian** terletak pada belum adanya kajian mendalam terkait strategi peningkatan kemandirian penerima manfaat dan penguatan sistem pendataan agar pelaksanaan PKH lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

3. Adnin Chiesa Syahwanes, Eli Apud Saepudin, Listia Ulya Madina, Shabna Azzahra, dan Ima Muslimah (2025). "Evaluasi Dampak PKH terhadap Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Akses Layanan Sosial bagi Keluarga Miskin" berfokus pada efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menurunkan angka kemiskinan dan memperluas akses masyarakat miskin terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Penelitian ini menggunakan metode campuran (mixed methods) dengan analisis data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Sosial yang dikombinasikan dengan data primer melalui wawancara

---

<sup>15</sup> B Jannati and W Subadi, "Efektifitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Desa Talan Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong," *Japb* 5 (2022): 542–54.

serta diskusi kelompok terarah (FGD). Analisis data dilakukan secara deskriptif dan komparatif untuk menilai dampak program terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKH berkontribusi positif dalam menekan kemiskinan ekstrem, meningkatkan partisipasi pendidikan anak dari keluarga miskin, serta memperluas akses terhadap layanan kesehatan ibu dan anak. Namun, kendala seperti ketidakakuratan data penerima, keterlambatan penyaluran bantuan, dan rendahnya kapasitas pendamping sosial masih menjadi hambatan.<sup>16</sup> **Gap penelitian** ditemukan pada aspek integrasi PKH dengan program pemberdayaan ekonomi, yang perlu dikaji lebih lanjut guna mewujudkan kemandirian dan keberlanjutan sosial-ekonomi penerima manfaat.

4. Natasya Ardy Garini, Shafira Hasya Ramadhan, “Evaluasi Program Keluarga Harapan Dengan Logic Model Di Desa Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat” evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) dengan menggunakan pendekatan *logic model* di Desa Kadudampit, Kabupaten Sukabumi. Penelitian ini berfokus pada penilaian efektivitas pelaksanaan program berdasarkan tahapan input, proses, output, dan outcome. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan pelaksanaan program di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKH telah berjalan cukup baik dan

---

<sup>16</sup> Adnin Chiesa Syahwanes et al., “Evaluasi Dampak PKH Terhadap Pengurangan Kemiskinan Dan Peningkatan Akses Layanan Sosial Bagi Keluarga Miskin. Analisis Mencakup Efektivitas Pemberian Bantuan Sosial Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat,” *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi* 1, no. 2 (2025): 176–83, <https://doi.org/10.63822/j6s5v471>.

memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan serta akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Namun demikian, masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya, seperti kurang optimalnya koordinasi antar pelaksana program serta permasalahan dalam pemutakhiran data penerima manfaat.<sup>17</sup> **Gap penelitian** terletak pada belum adanya analisis yang mengintegrasikan berbagai indikator evaluasi kebijakan publik secara komprehensif sehingga diperlukan kajian lanjutan yang lebih sistematis.

5. Ayuni Putri Anggraeni, Alih Aji Nugroho, “Evaluasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia” sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk menilai pelaksanaan program di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKH memberikan kontribusi positif dalam membantu masyarakat miskin, namun dalam implementasinya masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti ketidaktepatan sasaran penerima, keterbatasan jumlah bantuan dibandingkan kebutuhan masyarakat, serta adanya indikasi penyalahgunaan wewenang dalam proses penyaluran bantuan.<sup>18</sup>

**Gap penelitian** terletak pada belum adanya evaluasi yang menggunakan indikator kebijakan publik secara menyeluruh, seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan,

---

<sup>17</sup> Ii Rafinda and Ellies Sukmawati, “EVALUASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DENGAN LOGIC MODEL DI DESA KADUDAMPIT , KABUPATEN SUKABUMI ,” 6 (2023): 43–63.

<sup>18</sup> Ayuni Putri Anggraeni and Alih Aji Nugroho, “EVALUASI KEBIJAKAN PKH ( PROGRAM KELUARGA HARAPAN ) DI INDONESIA” 4, no. 2 (2022): 39–54.

pemerataan, responsivitas, dan ketepatan, sehingga diperlukan penelitian lanjutan yang lebih komprehensif.

**Persamaan :**

Sama-sama membahas evaluasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai kebijakan sosial pemerintah dalam mengurangi kemiskinan. Tujuannya pun sejalan, yaitu menilai efektivitas, ketepatan sasaran, dan dampak PKH terhadap kesejahteraan masyarakat miskin. Dari sisi metode, semua penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, fokus pembahasan juga serupa, terutama dalam mengungkap masalah seperti ketidaktepatan sasaran penerima, keterlambatan penyaluran bantuan, lemahnya pengawasan, serta kurangnya akurasi data dalam DTKS. Dengan demikian, baik penelitian ini maupun studi sebelumnya sama-sama memberikan kontribusi penting bagi pemerintah dalam memperbaiki pelaksanaan PKH agar lebih tepat sasaran dan efektif di lapangan.

**Perbedaan :**

Penelitian ini berfokus pada Kabupaten Pidie, yang merupakan salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Aceh (18,59% pada tahun 2024) serta memiliki karakter sosial, ekonomi, dan geografis yang kompleks, sedangkan penelitian terdahulu dilakukan di daerah lain seperti Pidie Jaya, Tabalong, dan beberapa wilayah lintas daerah. Dari segi fokus, penelitian ini lebih menekankan pada evaluasi efektivitas penyaluran PKH, terutama terkait mekanisme distribusi, ketepatan sasaran, transparansi, dan peran pendamping sosial, sementara penelitian

terdahulu lebih banyak membahas dampak PKH terhadap kemandirian ekonomi dan kesejahteraan sosial. Selain itu, penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan publik William N. Dunn (2018) dengan enam indikator penilaian, memberikan analisis yang lebih sistematis dan komprehensif dibandingkan penelitian sebelumnya yang cenderung hanya menilai efektivitas secara umum.

**Novelty Penelitian :**

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya yang menilai efektivitas penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) secara spesifik di Kabupaten Pidie dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan geografis lokal. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang bersifat umum, studi ini menyoroti ketepatan sasaran, transparansi distribusi, dan peran pendamping sosial dalam konteks daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Aceh. Hasilnya diharapkan memberi kontribusi nyata dalam perbaikan kebijakan dan pelaksanaan PKH berbasis kebutuhan lokal.

## **2.2 Teori Evaluasi Kebijakan Publik**

### **2.2.1 Pengertian Teori Evaluasi Kebijakan Publik**

Menurut William N. Dunn (2018). Menyatakan bahwa evaluasi sebagai proses ilmiah untuk menilai kinerja kebijakan berdasarkan data dan analisis sistematis. Evaluasi dipahami sebagai kegiatan yang bertujuan untuk menilai sejauh mana kebijakan publik mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalannya. Dunn menegaskan bahwa evaluasi bukan hanya sekadar memberikan penilaian

normatif, tetapi juga menyediakan dasar rasional bagi pengambilan keputusan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan<sup>19</sup>.

Evaluasi kebijakan memiliki peran strategis dalam siklus kebijakan publik yang mencakup identifikasi masalah, formulasi, implementasi, hingga tahap evaluasi itu sendiri. Proses ini menghasilkan informasi empiris yang digunakan untuk menilai apakah kebijakan masih relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hasil evaluasi dapat menjadi dasar untuk memperbaiki kebijakan yang sedang berjalan atau merancang kebijakan baru yang lebih tepat sasaran.<sup>20</sup> Dengan demikian, evaluasi berfungsi sebagai mekanisme umpan balik (feedback mechanism) yang memastikan bahwa kebijakan publik selalu berada pada jalur yang efektif dalam mencapai tujuannya.

**Tabel 2.1 Indikator Teori Evaluasi Kebijakan Publik**

<b>Indikator</b>	<b>Makna Dalam Teori Evaluasi Kebijakan Publik</b>
Efektivitas	Mengukur sejauh mana kebijakan tersebut berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Efisiensi	Menilai perbandingan antara hasil yang diperoleh dengan sumber daya (anggaran, waktu, tenaga) yang telah digunakan.
Kecukupan	Menilai sejauh mana kebijakan tersebut mampu memecahkan masalah yang dihadapi secara memadai.

<sup>19</sup> Megawati A. Mandarlangi, Intam Kurnia, and M. Nur Alamsyah, "Evaluasi Kebijakan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Di Kabupaten Parigi Moutong," *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 5, no. 3 (2024): 548–60.

<sup>20</sup> Dunn, William N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*. 6th Edition. New York & London: Routledge.

Pemerataan	Menilai keadilan dalam pendistribusian manfaat kebijakan di antara berbagai kelompok masyarakat.
Responsivitas	Mengukur sejauh mana kebijakan tersebut mampu menanggapi kebutuhan, aspirasi, dan kepuasan masyarakat.
Ketepatan	Menilai kesesuaian antara kebijakan yang dijalankan dengan permasalahan publik serta konteks sosial yang ada.

*Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2026*

Secara keseluruhan, teori evaluasi kebijakan publik menurut William N. Dunn menegaskan bahwa evaluasi merupakan instrumen penting untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dan memastikan kebijakan publik benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Evaluasi yang dilakukan secara sistematis dan berbasis bukti empiris dapat membantu pembuat kebijakan memahami kekuatan dan kelemahan suatu kebijakan, sehingga proses penyusunan dan pelaksanaannya dapat terus disempurnakan.<sup>21</sup> Dengan kata lain, evaluasi bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan bagian integral dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil yang nyata.

### **2.3 Program Keluarga Harapan (PKH)**

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial bersyarat yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 2007 dan diatur melalui Permensos No. 1 Tahun 2018. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup

---

<sup>21</sup> Muhammad Zakirin and Jauhar Arifin, "Evaluasi Kebijakan Dilihat Dari Aspek Dampak Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Hayaping Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur," *Jurnal Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis* 5, no. 1 (2022): 256–71.

keluarga miskin melalui pemberian bantuan tunai dengan syarat tertentu, seperti kewajiban menyekolahkan anak dan memanfaatkan layanan kesehatan dasar. Sasaran utama PKH adalah keluarga yang termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan Kementerian Sosial.<sup>22</sup> Secara implementatif, pelaksanaan PKH melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pendamping sosial di tingkat desa.

Mekanisme penyaluran dilakukan melalui bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah dan diawasi secara berkala oleh petugas sosial. Pendamping sosial berperan penting dalam memverifikasi data penerima manfaat, melakukan sosialisasi, serta memastikan penerima memenuhi kewajiban program.<sup>23</sup> Dengan demikian, PKH tidak hanya berfungsi sebagai bantuan konsumtif, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan sosial.

PKH memiliki dampak strategis terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia. Program ini membantu mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin serta meningkatkan akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada akurasi data penerima, ketepatan sasaran, dan transparansi dalam proses penyaluran.<sup>24</sup> Oleh karena itu, evaluasi berkala terhadap pelaksanaan PKH di

---

<sup>22</sup> E T Andi et al., “Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Perspektif Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Bagi Keluarga Penerima Manfaat,” *Jurnal Education* ... 13, no. 2 (2025): 494–99.

<sup>23</sup> Maria Florentina et al., “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA” 2, no. 1 (2025): 43–54.

<sup>24</sup> Listy Julfani and Ilham Mirzaya Putra, “Dampak Program Keluarga Harapan ( PKH ) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Miskin Di Kelurahan Kerasaan I Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun” 6, no. 1 (2023): 42–58, <https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i1.270>.

daerah, termasuk di Kabupaten Pidie, sangat penting untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan awalnya.

## 2.4 Konsep Evaluasi Program

Evaluasi program sosial adalah proses sistematis pengumpulan dan analisis bukti untuk menilai apakah suatu intervensi/program mencapai tujuan yang ditetapkan, bagaimana cara pelaksanaannya, serta apakah hasilnya sesuai harapan pemangku kepentingan. Tujuan utama evaluasi meliputi: (1) menilai efektivitas (apakah tujuan tercapai), (2) meningkatkan akuntabilitas terhadap pemangku kepentingan dan pendanaan, (3) memberikan umpan balik untuk perbaikan desain dan implementasi, serta (4) menyediakan bukti untuk pengambilan keputusan kebijakan ( penghentian program).<sup>25</sup>

Definisi ini selaras dengan uraian evaluasi kebijakan dan publikasi literatur evaluasi program yang menekankan fungsi penilaian bukti dan perbaikan kebijakan. Model evaluasi program dapat dibedakan berdasarkan waktu pelaksanaannya dan tujuan yang ingin dicapai. Evaluasi formatif dilakukan selama program masih berlangsung, dengan tujuan memberikan masukan agar pelaksanaan program dapat diperbaiki, hambatan awal dapat diatasi, dan kegiatan berjalan sesuai rencana.

---

<sup>25</sup> MHD. Rafi Yahya and Ilham Yuri Nanda Nanda, "Evaluasi Program Bantual Sosial Tunai (BST) Pada Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus; Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar)," *SUMUR- Jurnal Sosial Humaniora* 3, no. 1 (2025): 27–34, <https://doi.org/10.58794/sumur.v3i1.1341>.

Sementara itu, evaluasi sumatif dilakukan setelah program selesai untuk menilai sejauh mana tujuan telah tercapai, apakah hasilnya efektif, serta apakah program layak untuk dilanjutkan atau diperluas. Selain dua model utama tersebut, terdapat pula evaluasi proses yang menilai bagaimana kegiatan program dijalankan, evaluasi output, outcome, dan impact yang mengukur hasil langsung, perubahan jangka menengah, dan dampak jangka panjang, serta evaluasi pengembangan (*developmental evaluation*) yang digunakan untuk program yang masih dalam tahap penyesuaian atau terus mengalami perubahan.<sup>26</sup> Dalam praktiknya, evaluasi formatif dan sumatif sering digunakan secara bersamaan formatif membantu perbaikan selama pelaksanaan, sedangkan sumatif memberikan bukti akhir mengenai efektivitas program. William N. Dunn menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa kriteria utama. Pertama, efektivitas, yaitu sejauh mana tujuan program berhasil dicapai. Kedua, efisiensi, yang menilai perbandingan antara hasil yang diperoleh dengan sumber daya atau biaya yang digunakan. Ketiga, kecukupan (*adequacy*), yaitu apakah skala dan kualitas program sudah memadai untuk memenuhi kebutuhan kelompok sasaran. Keempat, pemerataan (*equity*), yang melihat apakah manfaat program telah didistribusikan secara adil di antara berbagai kelompok masyarakat. Kelima, responsivitas, yaitu sejauh mana program mampu menanggapi

---

<sup>26</sup> Meila Yufriana Devi, Yanti Fitria, and Universitas Negeri Padang, "Elementary Education <https://jbasic.org/index.php/basicedu>" 6, no. 1 (2022): 675–83.

kebutuhan, harapan, dan aspirasi penerima manfaat. Terakhir, ketepatan (accuracy), yang berkaitan dengan ketepatan sasaran serta pelaksanaan teknis di lapangan.<sup>27</sup>

Dalam praktiknya, setiap kriteria tersebut dapat diukur dengan indikator kuantitatif maupun kualitatif. Misalnya, efektivitas dapat dilihat dari persentase pencapaian hasil, efisiensi dari rasio biaya terhadap output, kecukupan dari proporsi kebutuhan yang terpenuhi, pemerataan dari distribusi manfaat antar kelompok sosial, serta responsivitas melalui survei kepuasan penerima layanan. Di Indonesia, kerangka evaluasi dari Dunn ini banyak digunakan untuk menilai berbagai program sosial pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), maupun program sanitasi masyarakat.

## 2.5 Kemiskinan dan Penanggulangannya

Kemiskinan dapat diartikan sebagai keadaan ketika seseorang atau rumah tangga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup layak, seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan, layanan kesehatan, dan pendidikan. Garis kemiskinan ditetapkan berdasarkan besarnya pengeluaran minimum yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan hidup tersebut.<sup>28</sup> Dengan kata lain, seseorang dikategorikan miskin apabila total pengeluarannya berada di bawah ambang batas garis kemiskinan yang ditetapkan pemerintah. Konsep ini tidak hanya mencerminkan kekurangan

---

<sup>27</sup> Elza Kamali Martins and Nelsia Tomalsia Toletina, "Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Program KIP-K Di Indonesia," *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik* 11, no. 1 (2024): 331–40, <https://doi.org/10.37676/professional.v11i1.6166>.

<sup>28</sup> Mihda Madaliyah and Syifa Rohmah, "Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia," *Jurnal Sahmiyya* 3, no. 1 (2024): 24–44.

pendapatan, tetapi juga mencakup keterbatasan akses terhadap layanan dasar dan peluang ekonomi yang memadai.

Faktor penyebab kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga kategori utama, yaitu struktural, kultural, dan natural. Faktor struktural mencakup ketimpangan ekonomi, rendahnya akses pendidikan, serta terbatasnya lapangan kerja. Faktor kultural berkaitan dengan sikap pasrah dan ketergantungan terhadap bantuan, sementara faktor natural meliputi kondisi geografis dan bencana alam yang menghambat produktivitas.<sup>29</sup> Dalam konteks Aceh, kemiskinan juga dipengaruhi oleh kondisi pascakonflik dan keterbatasan infrastruktur di daerah pedesaan.

Pemberdayaan sosial menjadi pendekatan yang penting dalam penanggulangan kemiskinan. Program seperti PKH dirancang tidak hanya untuk memberikan bantuan finansial, tetapi juga untuk mendorong perubahan perilaku dan peningkatan kapasitas keluarga miskin agar lebih mandiri. Melalui intervensi pendidikan, kesehatan, dan sosial, diharapkan penerima manfaat mampu keluar dari lingkaran kemiskinan dan berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi lokal.<sup>30</sup>

## 2.6 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi pelaksanaan PKH

Salah satu kendala utama pelaksanaan PKH adalah ketidakakuratan atau ketidakmutakhiran data penerima manfaat (KPM). Misalnya, penelitian di Kabupaten

---

<sup>29</sup> Ronaldo Putra Pratama Sinurat, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia," *Jurnal Registratie* 5, no. 2 (2023): 87–103, <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v5i2.3554>.

<sup>30</sup> Winny Wahyuni et al., "Evaluasi Kebijakan Perlindungan Sosial Dan Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan (PKH)," *Jurnal Pembangunan Dan Administrasi Publik* 5, no. 2 (2023): 11–22.

Rokan Hilir menunjukkan bahwa koordinasi antarinstansi dalam sinkronisasi data masih lemah, tugas-wewenang antar petugas tidak jelas, dan data seperti Kartu Keluarga atau KTP banyak yang belum lengkap, sehingga berdampak pada penentuan KPM dan penyaluran bantuan. Contoh lainnya, penelitian menyebut bahwa aplikasi Basis data seperti SIKS-NG masih menghadapi masalah pemutakhiran data KPM sehingga sasaran belum tepat.<sup>31</sup> Karena itu, peningkatan koordinasi antar-level (pusat, provinsi, kabupaten, desa) serta pendampingan dan pembaruan data secara rutin menjadi penting untuk memastikan program berjalan sesuai target.

Faktor kedua adalah hambatan teknis maupun administratif dalam penyaluran bantuan. Beberapa studi menunjukkan misalnya : pencairan bantuan yang sering terlambat, jarak antara pendamping dan penerima yang jauh, kurangnya jaringan/akses telekomunikasi di lokasi terpencil, pendamping yang tidak rutin mengunjungi rumah KPM, serta prosedur administratif yang sulit dipenuhi.<sup>32</sup> Contoh konkret dalam penelitian di Kelurahan Helvetia disebutkan bahwa pencairan bantuan sering tidak tepat waktu dan partisipasi masyarakat serta kesadaran penerima masih rendah yang memengaruhi efektivitas program.

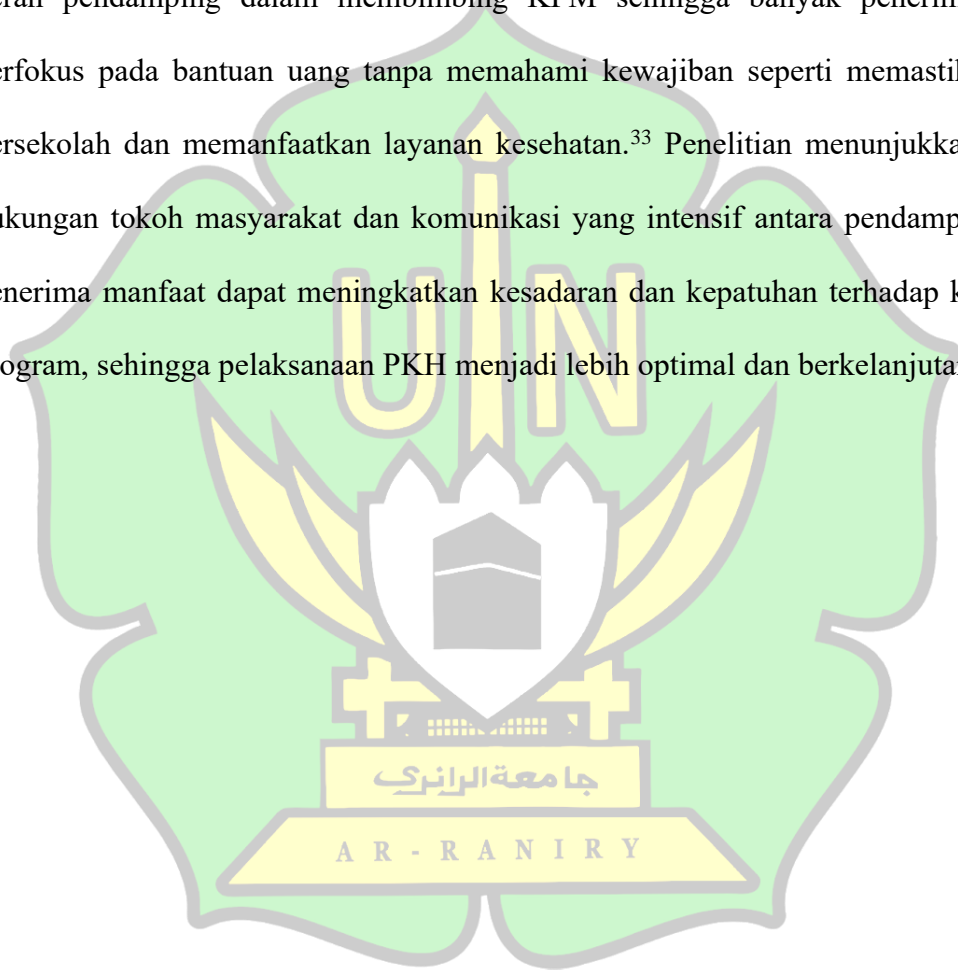
Partisipasi masyarakat dan penerima manfaat berperan penting dalam keberhasilan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) karena menentukan

---

<sup>31</sup> Kasmianti et Al, "EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENDUKUNG PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN," *Jurnal Ilmu Pengetahuan* 5, no. 2 (2021): 167–86.

<sup>32</sup> rati julia pita Sari, Tri Purwanti, and Ovita Charolina, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Penyaluran Bantuan Keluarga Harapan ( Pkh )," *Stia Bengkulu* 2, no. 2 (2023): 179–86.

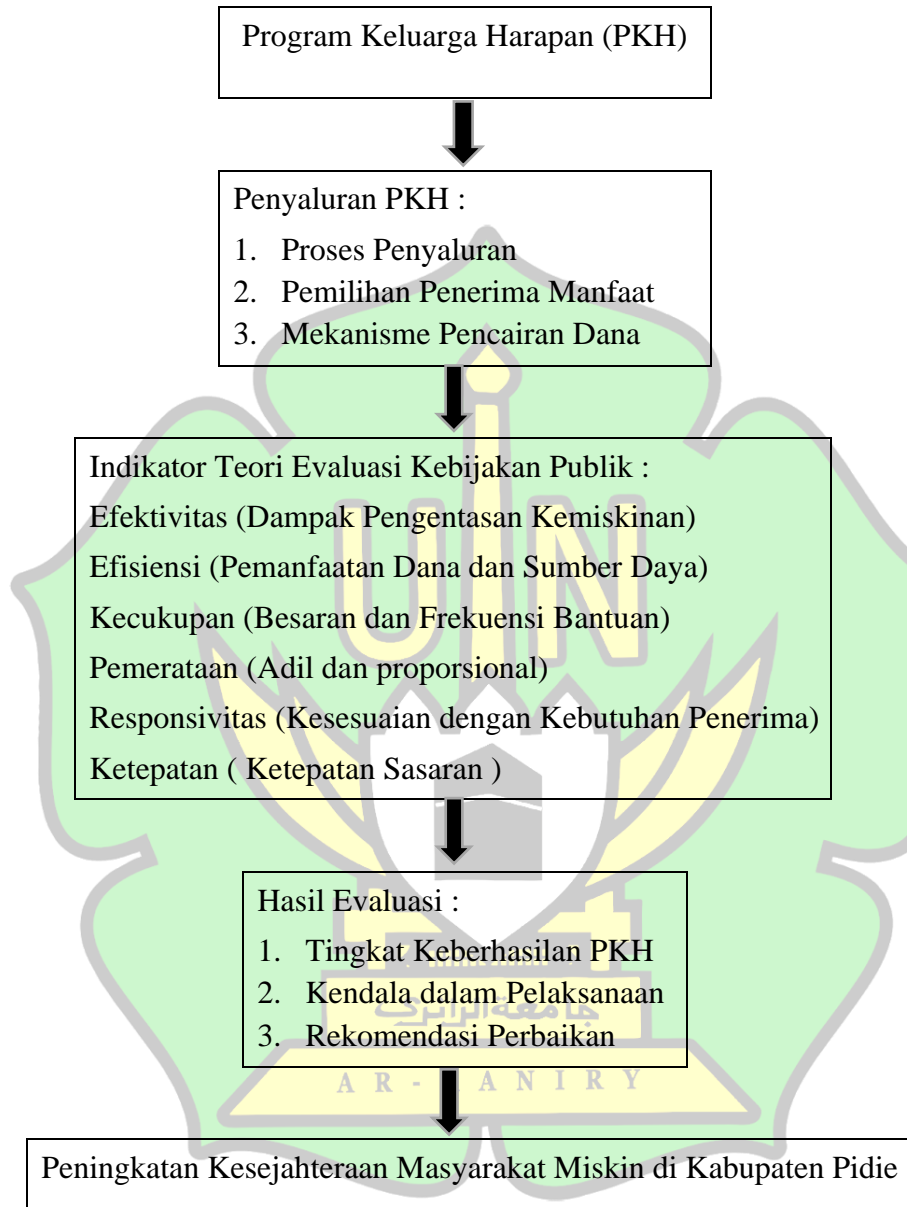
sejauh mana bantuan dapat mendorong perubahan perilaku dan peningkatan kesejahteraan keluarga miskin. Rendahnya partisipasi sering disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap tujuan program, minimnya sosialisasi, dan lemahnya peran pendamping dalam membimbing KPM sehingga banyak penerima hanya berfokus pada bantuan uang tanpa memahami kewajiban seperti memastikan anak bersekolah dan memanfaatkan layanan kesehatan.<sup>33</sup> Penelitian menunjukkan bahwa dukungan tokoh masyarakat dan komunikasi yang intensif antara pendamping serta penerima manfaat dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap ketentuan program, sehingga pelaksanaan PKH menjadi lebih optimal dan berkelanjutan.



---

<sup>33</sup> Defi Nur Safitri, Ahmad Suprastiyo, and Cahya Lukito, "IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM PENINGKATAN TARAF PENDIDIKAN DI DESA NGADIREJO KECAMATAN RENGEL KABUPATEN TUBAN," *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara* 5, no. 2 (2021): 1.

## 2.7 Kerangka Berpikir



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, yang dipilih karena memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di Aceh, yaitu 18,59% pada tahun 2024 (BPS Aceh, 2024). Selain itu, Pidie juga termasuk daerah dengan jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) terbanyak. Beberapa kecamatan dengan penerima PKH tertinggi dijadikan fokus penelitian agar hasilnya lebih menggambarkan kondisi nyata di lapangan. Pemilihan lokasi ini juga mempertimbangkan perbedaan sosial, ekonomi, dan geografis yang memengaruhi pelaksanaan program PKH di wilayah tersebut.

#### **3.2 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif dipilih karena berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial melalui penggalian data berupa narasi, pengalaman, dan pandangan informan. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis kondisi nyata yang terjadi di lapangan tanpa memanipulasi variabel.<sup>34</sup> Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggambarkan secara mendalam mekanisme distribusi

---

<sup>34</sup> M.Si Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. M.Si Dr. Patta Rapanna, SE., vol. 17 (CV. syakir Media Press, 1385).

bantuan, ketepatan sasaran penerima, serta dampak program terhadap kesejahteraan masyarakat.

### 3.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pidie dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan publik menurut William N. Dunn. Fokus penelitian dijabarkan ke dalam enam dimensi evaluasi beserta indikator-indikator operasionalnya. Keenam dimensi tersebut adalah efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Masing-masing dimensi diuraikan menjadi indikator-indikator spesifik yang akan menjadi panduan dalam pengumpulan data, wawancara mendalam, dan analisis hasil penelitian di lapangan.

**Tabel 3.1 Dimensi dan Indikator Penelitian**

No	Dimensi	Indikator	Keterangan
1	Efektivitas (Dampak Pengentasan Kemiskinan)	Dampak pengentasan kemiskinan	Menilai sejauh mana penyaluran PKH mampu menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Pidie, termasuk perubahan kondisi sosial-ekonomi KPM sebelum dan sesudah menerima bantuan.
2	Efisiensi (Pemanfaatan Dana dan Sumber Daya)	Pemanfaatan dana	Menilai apakah anggaran PKH yang dialokasikan telah tersalurkan secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran tanpa kebocoran atau keterlambatan yang berarti.
		Sumber daya manusia	Menilai kecukupan jumlah dan kapasitas pendamping sosial PKH dalam melayani, memverifikasi, dan mendampingi KPM di seluruh kecamatan Kabupaten Pidie.

3	Kecukupan (Besaran dan Frekuensi Bantuan)	Besaran bantuan	Menilai apakah nominal bantuan PKH yang diterima KPM sudah mencukupi untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan pangan.
		Frekuensi penyaluran	Menilai apakah pencairan bantuan sebanyak 4 kali dalam setahun (per triwulan) sudah cukup memadai untuk menjaga kesinambungan pemenuhan kebutuhan KPM.
4	Pemerataan (Adil dan Proporsional)	Keadilan distribusi bantuan	Menilai apakah bantuan PKH telah terdistribusi secara adil dan proporsional kepada seluruh keluarga miskin yang berhak, tanpa diskriminasi berdasarkan wilayah, gender, atau kelompok sosial tertentu.
		Akurasi data penerima (DTKS)	Menilai sejauh mana Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) mencerminkan kondisi riil kemiskinan di lapangan, serta mengidentifikasi adanya exclusion error maupun inclusion error dalam penetapan KPM.
5	Responsivitas (Kesesuaian dengan Kebutuhan Penerima)	Kesesuaian program dengan kebutuhan KPM	Menilai apakah mekanisme, prosedur, dan jenis bantuan PKH sudah sesuai dengan kebutuhan riil serta kondisi sosial-budaya masyarakat miskin di Kabupaten Pidie.
		Respons terhadap keluhan dan pengaduan	Menilai sejauh mana sistem pengaduan dan pendamping sosial PKH mampu merespons permasalahan yang dihadapi KPM secara cepat, tepat, dan transparan.
6	Ketepatan (Ketepatan Sasaran)	Ketepatan sasaran penerima	Menilai apakah bantuan PKH benar-benar diterima oleh keluarga yang masuk kriteria miskin/rentan sesuai standar DTKS Kementerian Sosial, bukan oleh keluarga yang tidak berhak.

		Verifikasi dan pemutakhiran data KPM	Menilai konsistensi pendamping dalam melakukan verifikasi komitmen KPM setiap triwulan serta pemutakhiran data agar penerima bantuan tetap sesuai dengan kondisi terkini.
		Graduasi mandiri KPM	Menilai efektivitas proses penonaktifan KPM yang kondisi ekonominya telah membaik (graduasi mandiri) agar bantuan dapat dialihkan kepada keluarga miskin lain yang lebih membutuhkan.

Sumber: Diadaptasi dari William N. Dunn (2018), *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*.

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan beberapa teknik yang saling melengkapi, yaitu:

#### 1. Wawancara Mendalam (In-depth Interview)

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur menggunakan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan rumusan masalah penelitian. Tujuannya untuk menggali informasi mendalam dari para informan mengenai pelaksanaan, hambatan, dan hasil program PKH di lapangan.

#### 2. Observasi Lapangan (Field Observation)

Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas penyaluran bantuan, interaksi antara pendamping PKH dengan KPM, serta situasi sosial di lingkungan penerima manfaat.

#### 3. Dokumentasi

Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen seperti laporan pelaksanaan PKH, data penerima manfaat, peraturan pemerintah, pedoman teknis, serta arsip dari Dinas Sosial dan BPS Kabupaten Pidie

### 3.5 Informan Penelitian

Penentuan informan dilakukan secara purposive sampling, yaitu teknik pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Kriteria informan adalah pihak-pihak yang memahami secara langsung proses pelaksanaan PKH di Kabupaten Pidie. Adapun informan dalam penelitian ini meliputi :

**Tabel 3.2 Informan Penelitian**

No	Informan Penelitian	Jumlah Informan	Alasan Memilih Informan
1	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pidie (Bapak Irwansyah)	1 Orang	Kepala Dinas Sosial memiliki kewenangan dan tanggung jawab langsung dalam perencanaan, koordinasi, pendataan serta pengawasan pelaksanaan PKH di tingkat daerah.
2	Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) (Bapak Ichwanul Muslimin)	1 Orang	Pendamping PKH memiliki peran langsung dalam proses pendampingan masyarakat penerima manfaat, mulai dari pendataan, verifikasi, hingga pengawasan penyaluran bantuan. Dalam penelitian ini, pendamping yang diwawancarai merupakan Koordinator Kecamatan

			(Korcam) Kembang Tanjung karena penelitian di lakukan di 2 desa yang ada di Kembang Tanjung.
3	Kepala Desa Glumpang (Bapak Hasnan) dan Aron Kuta Baro (Bapak Alwi)	2 Orang	Kepala desa memiliki peran penting dalam proses pendataan masyarakat, penetapan calon penerima manfaat, serta mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayahnya. Selain itu, kepala desa juga dapat memberikan informasi terkait proses penyaluran bantuan PKH di tingkat desa.
4	Masyarakat Penerima dan Bukan Penerima Manfaat Penerima: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rita Azzahra (Gp Glumpang)</li> <li>• Nurul Hakiki( Gp Aron Kuta Baro)</li> </ul> Bukan Penerima: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Srihayati( Gp Glumpang)</li> <li>• Nasrihayati (Gp Aron Kuta Baro)</li> </ul>	4 Orang	Bertujuan untuk melihat pelaksanaan PKH dari dua sudut pandang yang berbeda, yaitu dari masyarakat yang menerima bantuan dan masyarakat yang tidak menerima bantuan. Dengan demikian, peneliti dapat memperoleh gambaran mengenai efektivitas, ketepatan sasaran, serta respon masyarakat terhadap program PKH.
<b>Total Informan</b>		8 Orang	

*Sumber : Dibuat Oleh Penulis,2026*

### 3.6 Sumber Data

#### 1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di lapangan dengan para informan penelitian.

## 2. Data Sekunder

Meliputi data pendukung dari dokumen resmi pemerintah, publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), laporan Kementerian Sosial, peraturan daerah, serta literatur akademik seperti buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian

### 3.7 Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis menggunakan model analisis interaktif dari Miles & Huberman. Model ini dipilih karena sesuai dengan karakter penelitian kualitatif yang membutuhkan proses analisis secara berkesinambungan sejak pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan melalui tiga tahapan utama yang saling terkait, yaitu:

#### 1. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, serta transformasi data kasar yang diperoleh dari lapangan. Pada tahap ini, peneliti memilah data yang relevan dengan fokus penelitian, membuang data yang tidak diperlukan, serta mengorganisasikan data sehingga lebih mudah dikelola. Reduksi data membantu peneliti untuk tetap fokus pada aspek penting, seperti efektivitas program rehabilitasi, faktor pendukung, dan penghambat.

#### 2. Penyajian Data

Setelah direduksi, data disajikan dalam bentuk yang terorganisasi agar lebih mudah dipahami. Penyajian data dapat berupa narasi deskriptif, tabel, bagan, atau



*Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2026*

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**



**Gambar 4.1 Dinas Sosial Kabupaten Pidie**  
*Sumber: Diambil Oleh Peneliti, 2026*

Dinas sosial pidie terletak di Jl. Sigli - Blang Paseh, Pante Teungoh, Kec. Kota Sigli, Kabupaten Pidie, Aceh 24114, Dinas Sosial Kabupaten Pidie merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial di Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh. Lembaga ini berperan membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan serta melaksanakan program yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan perlindungan kelompok rentan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Dinas Sosial mengelola berbagai program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan, serta layanan bagi lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat kurang mampu. Selain itu, instansi ini juga bertanggung jawab dalam pendataan, verifikasi, dan validasi data masyarakat miskin melalui sistem data terpadu guna memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan. Dinas Sosial Kabupaten Pidie juga aktif berkoordinasi dengan pemerintah desa, tenaga pendamping sosial, dan lembaga terkait untuk meningkatkan efektivitas program serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

#### **4.1.1 Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Pidie**

**Visi:**

1. Terwujudnya Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

**Misi:**

1. Mewujudkan Pelayanan, Rehabilitasi dan Bantuan Sosial bagi Anak Terlantar, Lanjut Usia dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
2. Mewujudkan Pembinaan dan Pemberdayaan bagi Fakir Miskin serta pengenalan, Penguatan kapasitas Pendampingan Pemberdayaan dan Bantuan Stimulan serta Penataan Lingkungan Sosial.
3. Mewujudkan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Sosial Masyarakat.



penting dalam perencanaan, pengelolaan data penerima bantuan, serta penganggaran program PKH.

## 4.2 Hasil Penelitian

Evaluasi program merupakan suatu proses sistematis yang dilakukan untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan atau program telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, serta untuk mengetahui tingkat keberhasilan, hambatan, dan dampak yang dihasilkan. Dalam konteks Program Keluarga Harapan (PKH), evaluasi tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga mencakup proses pelaksanaan, mulai dari perencanaan, pendataan, penyaluran bantuan, hingga manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Melalui evaluasi, dapat diketahui apakah program telah berjalan secara optimal, tepat sasaran, serta mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

**Tabel 4.1 Indeks Bantuan Sosial PKH**

No	Kategori	Indeks/ Tahun Rp.	Indeks/3 Bulan Rp.	Indeks/2 Bulan Rp.	Indeks/Bulan Rp.
1.	Ibu Hamil	3.000.000	750.000	500.000	250.000
2.	Anak Usia 0-6 Tahun	3.000.000	750.000	500.000	250.000
3.	Anak Sekolah SD	900.000	225.000	150.000	75.000
4.	Anak Sekolah SLTP	1.500.000	375.000	250.000	125.000
5.	Anak Sekolah SLTA	2.000.000	500.000	333.333	166.666
6.	Disabilitas Berat	2.400.000	600.000	400.000	200.000
7.	Lanjut Usia (60 Tahun Ke Atas)	2.400.000	600.000	400.000	200.000

*Sumber: Oleh Dinas Sosial Kabupaten Pidie, 2026*

Berdasarkan Tabel 4.1 mengenai Indeks Bantuan Sosial PKH Tahun 2024, dapat diketahui bahwa besaran bantuan yang diberikan kepada penerima manfaat bervariasi sesuai dengan kategori komponen dalam setiap keluarga. Kategori dengan bantuan tertinggi per tahun adalah ibu hamil dan anak usia 0–6 tahun sebesar Rp3.000.000, sedangkan bantuan terendah diberikan kepada anak sekolah tingkat SD sebesar Rp900.000 per tahun. Sementara itu, kategori lainnya seperti anak sekolah SLTP, SLTA, penyandang disabilitas berat, dan lanjut usia memiliki nominal yang berada di antara kedua rentang tersebut.

Jika dilihat dari skema pencairannya, bantuan disalurkan secara bertahap, baik per tiga bulan, dua bulan, maupun per bulan. Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam mekanisme penyaluran yang disesuaikan dengan kebijakan pemerintah, sekaligus memudahkan penerima dalam mengelola bantuan secara berkala untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dalam penelitian ini, evaluasi penyaluran PKH di Kabupaten Pidie dianalisis menggunakan enam indikator utama, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

#### **4.2.1 Efektivitas (*Effectiveness*)**

Efektivitas (*effectiveness*) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana penyaluran PKH mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu

meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin serta mendorong akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pidie menyatakan bahwa:

“Menurut saya program PKH sudah berjalan sesuai dengan tujuan yang di harapkan, walaupun masih terdapat beberapa kendala keluhan dari masyarakat yang mengatakan bahwa masih ada yang belum tepat sasaran, padahal selama ini program PKH ini berjalan sesuai dengan tujuan yang di harapkan pemerintah.”<sup>35</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti menemukan bahwa program PKH pada Kabupaten Pidie sudah berjalan sesuai dengan tujuan yang di tetapkan oleh pemerintah hal ini mengindikasikan bahwa program tersebut telah menjangkau kelompok sasaran utama, sehingga secara umum dapat dikatakan efektif dalam hal cakupan penerima. Dengan kata lain, distribusi bantuan telah mampu menyentuh mayoritas masyarakat yang membutuhkan, meskipun masih terdapat sebagian kecil yang belum terakomodasi secara optimal.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu masyarakat penerima PKH yaitu saudari NH mengatakan bahwa:

“Bantuan PKH yang di berikan oleh pemerintah sangat membantu kami, apalagi PKH ini cairnya 3 bulan sekali pada saat anak-anak sekolah masuk pada tahun ajaran baru, jadi bantuan yang diberikan sangat meringankan beban kami untuk memenuhi kebutuhan pada sekolah anak-anak kami.”

---

<sup>35</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pidie, 13 April 2026

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti menemukan bahwa program PKH memberikan dampak positif yang dirasakan secara langsung oleh keluarga penerima manfaat. Bantuan sosial yang diberikan melalui program ini terbukti mampu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan. Dalam aspek pendidikan, bantuan PKH dimanfaatkan oleh penerima untuk memenuhi berbagai kebutuhan sekolah anak, seperti pembelian perlengkapan belajar, pembayaran biaya pendidikan, serta mendukung keberlanjutan pendidikan agar anak tidak mengalami putus sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa program PKH memiliki kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan akses dan partisipasi pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pidie menyatakan bahwa:

“PKH ini merupakan bantuan sosial bersyarat yang di peruntukan untuk keluarga miskin yg ada komponen anak sekolah, lansia, dan disabilitas, yang sifatnya di berikan secara reguler, selama komponen itu belum lepas dari garis kemiskinan. Program ini dimulai sejak tahun 2007 sampai sekarang, untuk evaluasi di lakukan rutin setiap tahunnya, tergantung kebutuhan”<sup>36</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pidie, dapat dipahami bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bantuan sosial bersyarat yang secara spesifik ditujukan kepada keluarga miskin yang memiliki

---

<sup>36</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Sosial, 13 April 2026

komponen tertentu, seperti anak sekolah, lansia, dan penyandang disabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa program telah dirancang dengan sasaran yang jelas dan berbasis pada kelompok rentan, sehingga implementasinya lebih terarah dan tepat sasaran.

Pemberian bantuan yang dilakukan secara rutin selama penerima masih berada di bawah garis kemiskinan mengindikasikan bahwa PKH memiliki sifat keberlanjutan. Artinya, program ini tidak hanya bersifat sementara, tetapi berupaya memberikan dukungan jangka panjang bagi masyarakat miskin agar dapat meningkatkan kesejahteraan mereka secara bertahap. Selain itu, keberlangsungan program sejak tahun 2007 hingga saat ini menunjukkan adanya konsistensi pemerintah dalam menjalankan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Di sisi lain, adanya evaluasi yang dilakukan setiap tahun menandakan bahwa program ini tetap berada dalam pengawasan dan peninjauan secara berkala. Namun, pelaksanaan evaluasi yang disebut “tergantung kebutuhan” mengindikasikan bahwa mekanisme evaluasi masih bersifat fleksibel. Hal ini dapat menjadi perhatian, karena evaluasi yang belum sepenuhnya terstandarisasi berpotensi memengaruhi optimalisasi pelaksanaan program di lapangan.

#### **4.2.2 Efisiensi (*Efficiency*)**

Efisiensi (*efficiency*) berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya dalam pelaksanaan program, baik dari segi waktu, tenaga, maupun biaya. Dalam konteks penelitian ini, efisiensi digunakan untuk melihat apakah proses penyaluran PKH telah

dilakukan secara optimal dengan penggunaan sumber daya yang minimal namun menghasilkan manfaat yang maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Glumpang kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie menyatakan bahwa:

“Sebelumnya kami mengumpulkan data masyarakat yang dikategorikan miskin atau berada pada rentang desil 1-4 dan memiliki komponen untuk mendapatkan bantuan PKH, lalu operator desa menginput data tersebut untuk di usulkan mendapatkan bantuan, dapat atau tidaknya itu tergantung pada pemerintah kami hanya mengusulkan masyarakat yang layak mendapatkan, dan sejauh ini hampir semua masyarakat mendapatkan bantuan.”<sup>37</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa pada salah satu gampong di Kabupaten Pidie, menemukan bahwa proses pelaksanaan program telah berjalan secara sistematis, dimulai dari pendataan masyarakat yang tergolong miskin (desil 1–4) dan memiliki komponen penerima manfaat, kemudian dilanjutkan dengan penginputan data oleh operator desa untuk diusulkan sebagai penerima bantuan.

Pembagian tugas antara perangkat desa dan operator menunjukkan pemanfaatan tenaga kerja yang efektif sesuai dengan fungsi masing-masing, sehingga dapat meminimalisir terjadinya tumpang tindih pekerjaan. Selain itu, alur proses yang jelas dan tidak berbelit menunjukkan adanya efisiensi dari segi waktu. Hasil yang dicapai juga tergolong optimal, terlihat dari pernyataan bahwa sebagian besar masyarakat yang diusulkan dapat menerima bantuan PKH.

---

<sup>37</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Desa, 14 April 2026

**Tabel 4.2 Data Penerima Program Keluarga harapan (PKH) Berdasarkan Desil**

No	Desil	Jumlah KK	Jumlah Individu
1	Desil 1	28.559	103.389
2	Desil 2	25.818	93.772
3	Desil 3	22.333	73.822
4	Desil 4	17.431	52.264
Total		94.141	323.247

*Sumber: Oleh Peneliti (Diolah dari data Dinas Sosial Kabupaten Pidie)*

Berdasarkan Tabel 4.2 mengenai data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan desil, dapat dianalisis bahwa jumlah penerima manfaat menunjukkan tren menurun dari desil 1 hingga desil 4. Desil 1 sebagai kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah memiliki jumlah penerima tertinggi, yaitu sebanyak 28.559 KK dengan 103.389 individu. Hal ini menunjukkan bahwa program PKH telah memprioritaskan kelompok masyarakat paling miskin sebagai sasaran utama.

Selanjutnya, pada desil 2 dan desil 3 terjadi penurunan jumlah penerima, masing-masing sebesar 25.818 KK (93.772 individu) dan 22.333 KK (73.822 individu). Penurunan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat desil (yang berarti kondisi ekonomi relatif lebih baik), maka jumlah penerima bantuan semakin berkurang. Kondisi ini sejalan dengan tujuan PKH yang memang difokuskan pada rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah.

Pada desil 4, jumlah penerima semakin menurun menjadi 17.431 KK dengan 52.264 individu, yang menunjukkan bahwa kelompok ini merupakan batas atas

penerima bantuan sebelum memasuki kategori masyarakat yang dianggap tidak lagi layak menerima PKH.

Secara keseluruhan, total penerima PKH mencapai 94.141 KK dengan 323.247 individu. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa distribusi bantuan PKH telah mengikuti prinsip prioritas berdasarkan tingkat kemiskinan (desil), di mana semakin rendah desil, semakin besar proporsi penerima bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa program PKH relatif telah tepat sasaran, meskipun tetap diperlukan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan tidak terjadi kesalahan inklusi maupun eksklusi dalam penetapan penerima manfaat.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu masyarakat penerima PKH yaitu saudari RZ mengatakan bahwa:

“Biasanya PKH ini cairnya 3 bulan sekali dan tidak pernah telat, walaupun telat hanya telat beberapa hari saja, untuk pencairannya masuk pada rekening jadi ketika sudah cair kami para penerima PKH tinggal ambil di ATM.”<sup>38</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat penerima PKH menemukan bahwa penyaluran bantuan PKH telah berjalan secara efisien, khususnya dari aspek ketepatan waktu dan kemudahan proses pencairan. Informan menyatakan bahwa bantuan PKH umumnya disalurkan setiap tiga bulan sekali dan jarang mengalami keterlambatan. Walaupun terjadi keterlambatan, hal tersebut hanya berlangsung dalam waktu yang relatif singkat, yaitu beberapa hari saja. Hal ini

---

<sup>38</sup> Hasil Wawancara dengan Masyarakat, 13 April 2026

menunjukkan bahwa pengelolaan waktu dalam penyaluran bantuan telah berjalan dengan baik.

Selain itu, proses pencairan bantuan yang dilakukan melalui rekening bank juga mencerminkan efisiensi dalam hal kemudahan akses bagi penerima manfaat. Penerima PKH hanya perlu mengambil bantuan melalui ATM tanpa harus melalui prosedur yang rumit atau memakan waktu lama. Sistem ini tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga mengurangi potensi biaya tambahan serta meningkatkan kenyamanan bagi penerima bantuan.

#### 4.2.3 Kecukupan (*Adequacy*)

Kecukupan (*adequacy*) mengacu pada sejauh mana bantuan yang diberikan melalui PKH mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin. Indikator ini menilai apakah bantuan yang diterima sudah cukup untuk membantu mengatasi permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh penerima manfaat.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pidie menyatakan bahwa:

“Setiap masyarakat yang mendapatkan bantuan PKH ini jumlah yang di dapat tentu berbeda-beda, karena sesuai dengan komponen yang di miliki.”<sup>39</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pidie, menemukan bahwa besaran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterima

---

<sup>39</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pidie, 13 April 2026

oleh masyarakat tidak bersifat seragam, melainkan berbeda-beda sesuai dengan komponen yang dimiliki oleh masing-masing keluarga penerima manfaat. Perbedaan komponen tersebut, keberadaan ibu hamil, anak usia sekolah, lanjut usia, maupun penyandang disabilitas, menjadi dasar dalam menentukan jumlah bantuan yang diterima.

Hal ini menunjukkan bahwa program PKH telah dirancang dengan mempertimbangkan aspek kecukupan (*adequacy*), di mana bantuan diberikan secara proporsional berdasarkan kebutuhan masing-masing penerima. Dengan demikian, secara konseptual bantuan yang diberikan diharapkan mampu lebih tepat sasaran dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin.

Berdasarkan hasil penelitian yang menyatakan bahwa setiap Kartu Keluarga (KK) maksimal hanya dapat menerima empat kategori bantuan, maka dapat dipahami bahwa terdapat batasan dalam akumulasi jumlah bantuan yang diterima oleh setiap keluarga. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan pemerataan distribusi bantuan agar tidak terpusat pada satu keluarga saja, serta memberikan kesempatan kepada keluarga lain yang juga membutuhkan.

#### 4.2.4 Pemerataan (*Equity*)

Pemerataan (*equity*) merupakan indikator yang digunakan untuk melihat keadilan dalam distribusi bantuan PKH kepada masyarakat miskin. Hal ini mencakup apakah seluruh masyarakat yang berhak telah menerima bantuan secara merata tanpa adanya kesenjangan atau ketidaktepatan sasaran.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Pendamping PKH mengatakan bahwa:

“Untuk menetapkan penerima PKH awalnya masyarakat mengajukan diri langsung kepada operator gampong, lalu data tersebut masuk ke BPS ataupun ke daerah dari daerah di kirim ke pendamping desa, setelah itu kami selaku pendamping desa melakukan verifikasi data dari BPS yang di kirim melalui aplikasi SIKS-NG untuk menyeleksi apakah layak menerima bantuan atau tidak dengan cara mewawancarai langsung calon penerima, dan melihat dari tempat tinggal, kendaraan, serta mewawancarai juga masyarakat setempat/tetangganya.”<sup>40</sup>

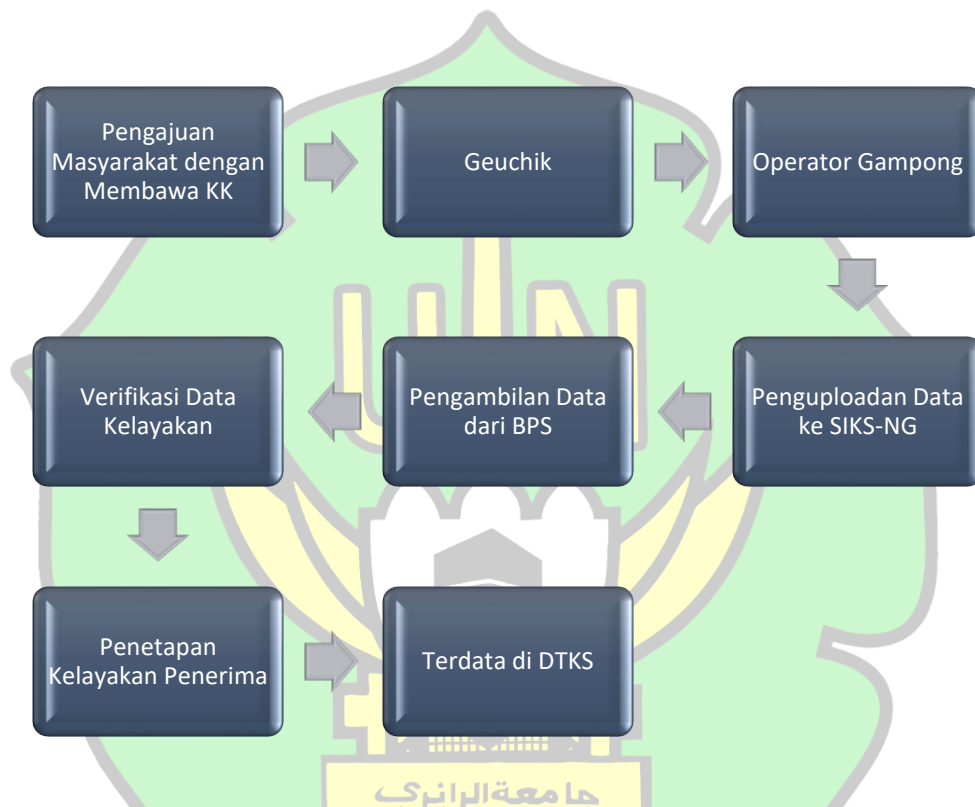
Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti menemukan bahwa proses penetapan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) telah dilakukan melalui tahapan yang cukup sistematis dan berlapis. Proses tersebut dimulai dari pengajuan oleh masyarakat kepada operator gampong, kemudian data diteruskan ke BPS dan selanjutnya diserahkan kepada pendamping PKH untuk dilakukan verifikasi di tingkat lapangan. Dalam tahap verifikasi, pendamping tidak hanya mengandalkan data administratif, tetapi juga melakukan wawancara langsung dengan calon penerima serta mengamati kondisi riil seperti tempat tinggal, kepemilikan kendaraan, dan informasi dari masyarakat sekitar.

Temuan ini menunjukkan bahwa upaya pemerataan (equity) dalam distribusi bantuan PKH telah diusahakan melalui mekanisme seleksi yang ketat dan berbasis kondisi faktual di lapangan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang layak dan membutuhkan. Namun demikian,

---

<sup>40</sup> Hasil Wawancara dengan Pendamping PKH, 14 April 2026

meskipun prosedur telah dirancang dengan cukup baik, potensi ketidaktepatan sasaran masih dapat terjadi, sehingga diperlukan peningkatan akurasi data serta pengawasan yang berkelanjutan agar prinsip keadilan dalam penyaluran bantuan dapat tercapai secara optimal.



**Gambar 4.3 Alur Penetapan Penerima PKH**

*Sumber: Di Olah Oleh Peneliti, 2026*

Bagan di atas menunjukkan alur penetapan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang dimulai dari pengajuan masyarakat dengan membawa Kartu Keluarga (KK) sebagai syarat administrasi awal. Setelah pengajuan dilakukan, data masyarakat diteruskan kepada Geuchik untuk mendapatkan pengesahan atau rekomendasi sebagai

bentuk validasi awal di tingkat gampong. Selanjutnya, data diserahkan kepada operator gampong untuk diproses dan diinput ke dalam sistem.

Tahap berikutnya adalah pengunggahan data ke Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) yang digunakan sebagai basis pengelolaan data bantuan sosial. Setelah data diunggah, dilakukan pengambilan dan pencocokan data dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) guna memastikan kesesuaian identitas dan kondisi sosial ekonomi calon penerima. Kemudian dilakukan verifikasi data kelayakan untuk menilai apakah masyarakat yang mengajukan memenuhi kriteria sebagai penerima PKH.

Apabila hasil verifikasi menunjukkan bahwa masyarakat memenuhi persyaratan, maka dilakukan penetapan kelayakan penerima bantuan. Tahap akhir dari proses tersebut adalah masyarakat yang dinyatakan layak akan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai dasar resmi penerimaan bantuan sosial PKH dari pemerintah.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu masyarakat bukan penerima PKH saudari SH mengatakan bahwa:

“Sejauh ini yang saya lihat bantuan PKH ini di berikan secara adil dan sudah merata mencapai kepada masyarakat yang membutuhkan, tapi ya memang terkadang kalau di lihat lagi masih ada ½ masyarakat yang belum mendapatkan bantuan, mungkin karena kouta yang di berikan pemerintah itu terbatas”<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Hasil Wawancara dengan Masyarakat, 14 April 2026

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat yang bukan penerima PKH, menemukan bahwa distribusi bantuan PKH pada umumnya telah berjalan cukup adil dan merata. Informan menyatakan bahwa bantuan telah menjangkau masyarakat yang membutuhkan, sehingga secara umum mencerminkan adanya upaya pemerataan dalam penyaluran bantuan.

Namun demikian, informan juga mengungkapkan bahwa masih terdapat sebagian masyarakat yang layak menerima bantuan tetapi belum terakomodasi sebagai penerima PKH. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerataan belum sepenuhnya tercapai secara optimal. Salah satu faktor yang memengaruhi hal tersebut adalah keterbatasan kuota bantuan yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga tidak seluruh masyarakat yang memenuhi kriteria dapat menerima bantuan.

**Tabel 4.3 Data Jumlah Penerima PKH Kabupaten Pidie 2025**

Periode Penyaluran	Jan-Mar	Apr-Jun	Jul-Sep	Okt-Des
Jumlah KPM (Jiwa)	35.229	36.132	35.149	35.291
Rata-Rata	35.450			

*Sumber: Kementerian Sosial RI, 2025 (diolah dari data Dinas Sosial Kabupaten Pidie)*

Berdasarkan Tabel 4.2 mengenai jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pidie tahun 2025, dapat diketahui bahwa jumlah penerima bantuan relatif stabil sepanjang tahun dengan sedikit fluktuasi pada setiap periode penyaluran. Pada periode Januari–Maret tercatat sebanyak 35.229 penerima, kemudian mengalami peningkatan pada April–Juni menjadi 36.132 penerima. Selanjutnya, pada

Juli–September jumlah penerima kembali menurun menjadi 35.149, dan pada Oktober–Desember sedikit meningkat menjadi 35.291 penerima.

Fluktuasi jumlah penerima ini menunjukkan adanya proses pembaruan data (updating) dan verifikasi penerima manfaat yang dilakukan secara berkala oleh pemerintah. Peningkatan jumlah penerima pada periode April–Juni mengindikasikan adanya penambahan masyarakat yang dinilai layak menerima bantuan, sedangkan penurunan pada periode berikutnya dapat disebabkan oleh adanya penerima yang tidak lagi memenuhi kriteria, seperti perubahan kondisi ekonomi atau hasil verifikasi data terbaru.

Dari perspektif pemerataan (*equity*), data ini menunjukkan bahwa pemerintah telah berupaya menjaga distribusi bantuan agar tetap menjangkau masyarakat yang membutuhkan secara berkelanjutan. Jumlah penerima yang tidak mengalami perubahan signifikan juga mencerminkan adanya konsistensi dalam cakupan program.

#### 4.2.5 Responsivitas (*Responsiveness*)

Responsivitas (*responsiveness*) berkaitan dengan kemampuan pihak pelaksana program dalam merespon kebutuhan, aspirasi, dan keluhan masyarakat. Dalam penelitian ini, responsivitas digunakan untuk menilai sejauh mana pendamping dan pelaksana PKH tanggap terhadap permasalahan yang dihadapi oleh penerima manfaat.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pidie menyatakan bahwa:

“Hampir setiap hari ada masyarakat yang mengadu kenapa desil saya segini, kenapa saya tidak dapat bantuan, ya kami hanya membantu menjelaskan bahwa untuk hal tersebut pengaduannya itu ke operator gampong, tapi kami tetap menjelaskan sebagaimana mestinya, tidak langsung menolak akan kedatangan masyarakat yang mengadu, dari mulai bulan Januari 2026 sd April 2026 total masyarakat yang berkunjung ke Dinas Sosial untuk membuat pengaduan sekitar 642 Orang”<sup>42</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pidie, responsivitas pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) dapat dikatakan cukup baik. Hal ini ditunjukkan dari adanya keterbukaan pihak Dinas Sosial dalam menerima pengaduan masyarakat terkait bantuan sosial. Kepala Dinas Sosial menyampaikan bahwa hampir setiap hari terdapat masyarakat yang datang untuk mengadu mengenai status penerimaan bantuan, seperti pertanyaan terkait desil kesejahteraan maupun alasan tidak terdaftar sebagai penerima manfaat.

Dalam menanggapi hal tersebut, pihak Dinas Sosial tidak menolak pengaduan masyarakat, melainkan memberikan penjelasan secara langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, masyarakat juga diarahkan untuk menyampaikan pengaduan lebih lanjut kepada operator gampong sebagai pihak yang berwenang dalam proses pendataan. Selama periode Januari hingga April 2026, tercatat sekitar 642 masyarakat yang datang ke Dinas Sosial untuk menyampaikan pengaduan, yang menunjukkan tingginya intensitas interaksi antara masyarakat dan pelaksana program.

---

<sup>42</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pidie, 13 April 2026

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu masyarakat bukan penerima PKH yaitu saudari NY mengatakan bahwa:

“Saya tidak dapat bantuan PKH lalu saya bertanya kepada operator gampong, katanya karena saya tidak punya anak lalu di jelaskan untuk syarat penerima PKH itu harus miskin dan memiliki komponen, menurut saya respon dari operator gampong sudah sangat baik karena mudah di pahami dan kami sebagai masyarakat miskin merasa di respon.”<sup>43</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu masyarakat bukan penerima PKH, menemukan bahwa responsivitas pelaksana program di tingkat gampong tergolong baik. Hal ini terlihat dari adanya tanggapan yang jelas dan mudah dipahami yang diberikan oleh operator gampong terkait alasan tidak diterimanya bantuan PKH. Operator gampong menjelaskan bahwa salah satu syarat penerima bantuan adalah tergolong masyarakat miskin yang memiliki komponen tertentu, seperti anak, sehingga masyarakat dapat memahami dasar penetapan penerima manfaat.

Selain itu, kemampuan operator gampong dalam menyampaikan informasi secara sederhana dan komunikatif menunjukkan adanya respons yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Saudari NY juga menyatakan bahwa penjelasan yang diberikan mudah dipahami dan membuat masyarakat merasa direspons dengan baik. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksana program tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga mampu membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat.

---

<sup>43</sup> Hasil Wawancara dengan Masyarakat, 14 April 2026

#### 4.2.6 Ketepatan (*Appropriateness*)

Ketepatan (*appropriateness*) merupakan indikator yang menilai kesesuaian antara program PKH dengan kebutuhan masyarakat miskin. Indikator ini digunakan untuk melihat apakah program yang dilaksanakan sudah tepat sasaran dan relevan dengan kondisi serta permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di Kabupaten Pidie.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pidie menyatakan bahwa:

“Masyarakat penerima bantuan PKH wajib memenuhi syarat, yang pertama harus miskin yang berada pada rentang desil 1-4 yang mana desil 1 itu sangat miskin, lalu desil 2 itu miskin, desil 3 hampir miskin, dan desil 4 rawan miskin, nah orang-orang ini yang berhak mendapatkan bantuan PKH tetapi dengan syarat lagi memenuhi komponen, yaitu dalam keluarganya terdapat ibu hamil, lansia, anak balita, anak sekolah, dan disabilitas, namun dalam 1 KK maksimal hanya boleh mendapatkan 4 komponen saja.”<sup>44</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti menemukan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pidie telah mengacu pada kriteria yang jelas dan terarah dalam penetapan penerima manfaat. Penentuan sasaran didasarkan pada tingkat kesejahteraan masyarakat yang diklasifikasikan dalam desil 1 sampai dengan desil 4, di mana kelompok tersebut merupakan kategori masyarakat sangat miskin hingga rentan miskin yang memang menjadi prioritas program. Selain itu, penerima bantuan tidak hanya dilihat dari kondisi ekonomi semata, tetapi juga

---

<sup>44</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Sosial, 13 April 2026

harus memenuhi komponen tertentu dalam keluarga, seperti adanya ibu hamil, lansia, anak balita, anak sekolah, atau penyandang disabilitas.

Temuan ini menunjukkan bahwa program PKH telah dirancang secara tepat sasaran (*appropriate*), karena mempertimbangkan tidak hanya aspek kemiskinan, tetapi juga kebutuhan spesifik rumah tangga penerima manfaat. Dengan demikian, bantuan yang diberikan diharapkan dapat lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan serta mendukung aspek kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Namun demikian, meskipun kriteria telah ditetapkan dengan jelas, tetap diperlukan pengawasan dan validasi data secara berkala agar tidak terjadi ketidaktepatan sasaran dalam implementasinya di lapangan.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Aron Kuta Baro kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie yang mengatakan bahwa:

“Menurut saya program PKH ini sudah tepat sasaran karena sudah mencapai kepada masyarakat miskin, dan sejauh ini ada beberapa masyarakat yang desil nya juga sudah naik menjadi desil 5 dan ada beberapa yang desilnya lebih bagus.”<sup>45</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu kepala desa yang ada di Kabupaten Pidie, ketepatan (*appropriateness*) pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dapat dikatakan sudah cukup baik. Hal ini ditunjukkan dari pernyataan bahwa program PKH telah mampu menjangkau masyarakat miskin sebagai sasaran utama penerima manfaat. Dengan demikian, secara umum program ini telah berjalan sesuai

---

<sup>45</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pidie, 13 April 2026

dengan tujuan yang ditetapkan, yaitu membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Selain itu, adanya peningkatan desil kesejahteraan pada sebagian penerima manfaat, seperti yang disampaikan bahwa beberapa masyarakat mengalami kenaikan ke desil 5 dan kondisi yang lebih baik, menunjukkan bahwa program PKH tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menjadi indikator bahwa bantuan yang diberikan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan mampu mendorong perubahan kondisi sosial ekonomi penerima manfaat.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu masyarakat bukan penerima PKH yaitu saudari SH mengatakan bahwa:

“Penerima PKH pada desa ini sudah tepat sasaran karena yang menerima benar-benar membutuhkan jadi kalau menurut saya itu sudah tepat sasaran dengan adanya program PKH ini ekonomi masyarakat yang membutuhkan agak sedikit lebih terbantu.”<sup>46</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat, menemukan bahwa pelaksanaan program ini telah menunjukkan ketepatan sasaran yang cukup baik. Hal ini terlihat dari pernyataan informan yang menyebutkan bahwa penerima bantuan merupakan masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Artinya, proses penentuan penerima manfaat sudah sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat di lapangan.

---

<sup>46</sup> Hasil Wawancara dengan Masyarakat, 13 April 2026

Penilaian dari saudari SH yang bukan penerima bantuan menunjukkan adanya pandangan yang cukup objektif. Ia tidak merasa dirugikan atau adanya ketidakadilan dalam penyaluran bantuan, sehingga dapat diartikan bahwa tidak terjadi kecemburuan sosial yang signifikan di masyarakat. Hal ini menjadi indikasi bahwa program PKH telah diterima dengan baik oleh masyarakat secara umum.

Saudari SH juga menyampaikan bahwa program PKH mampu membantu kondisi ekonomi masyarakat. Pernyataan ini menunjukkan bahwa bantuan yang diberikan memang memiliki dampak positif, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar. Namun, di sisi lain juga menggambarkan bahwa bantuan tersebut belum cukup untuk meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Pendamping PKH mengatakan bahwa:

“Untuk saat ini kami ada opsi untuk masyarakat yang sebelumnya mendapatkan Pkh lalu di nyatakat sudah tidak berhak lagi, opsi itu namanya graduasi PPSE yang mana ini untuk pemberdayaan, kita tawarkan dalam bentuk pemberdayaan ekonomi, kemudian kita jelaskan kepada masyarakatnya kenapa di tawarkan opsi ini yaitu dikarenakan dia sudah tidak berhak lagi menerima PKH karena dia sudah di anggap mampu“<sup>47</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pendamping PKH, Berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), dapat dianalisis bahwa pelaksanaan program tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan sosial semata, tetapi juga diarahkan pada upaya pemberdayaan ekonomi melalui

---

<sup>47</sup> Hasil Wawancara dengan Pendamping PKH, 14 April 2026

mekanisme graduasi, khususnya *Graduasi PPSE*. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pendamping memiliki peran penting dalam mendorong kemandirian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan memberikan pemahaman bahwa bantuan PKH bersifat sementara dan ditujukan untuk membantu masyarakat hingga mencapai kondisi yang lebih sejahtera. Ketika KPM dinilai telah mampu secara ekonomi, maka dilakukan proses graduasi dengan menawarkan program pemberdayaan sebagai alternatif untuk meningkatkan keberlanjutan kesejahteraan. Hal ini mencerminkan adanya upaya transformasi dari bantuan konsumtif menuju pendekatan produktif. Namun demikian, keberhasilan proses ini sangat bergantung pada kesiapan KPM serta efektivitas pendamping dalam memberikan edukasi dan pembinaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran pendamping PKH sangat strategis dalam memastikan keberhasilan program, khususnya dalam mendorong kemandirian ekonomi dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial.

#### **4.3 Pembahasan**

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pidie menunjukkan capaian yang cukup baik apabila dianalisis menggunakan enam indikator evaluasi kebijakan publik, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Berdasarkan perspektif teori evaluasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh William N. Dunn, evaluasi tidak hanya berfungsi untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan, tetapi juga untuk mengidentifikasi berbagai kelemahan yang dapat dijadikan dasar dalam perbaikan kebijakan ke depan. Hasil penelitian

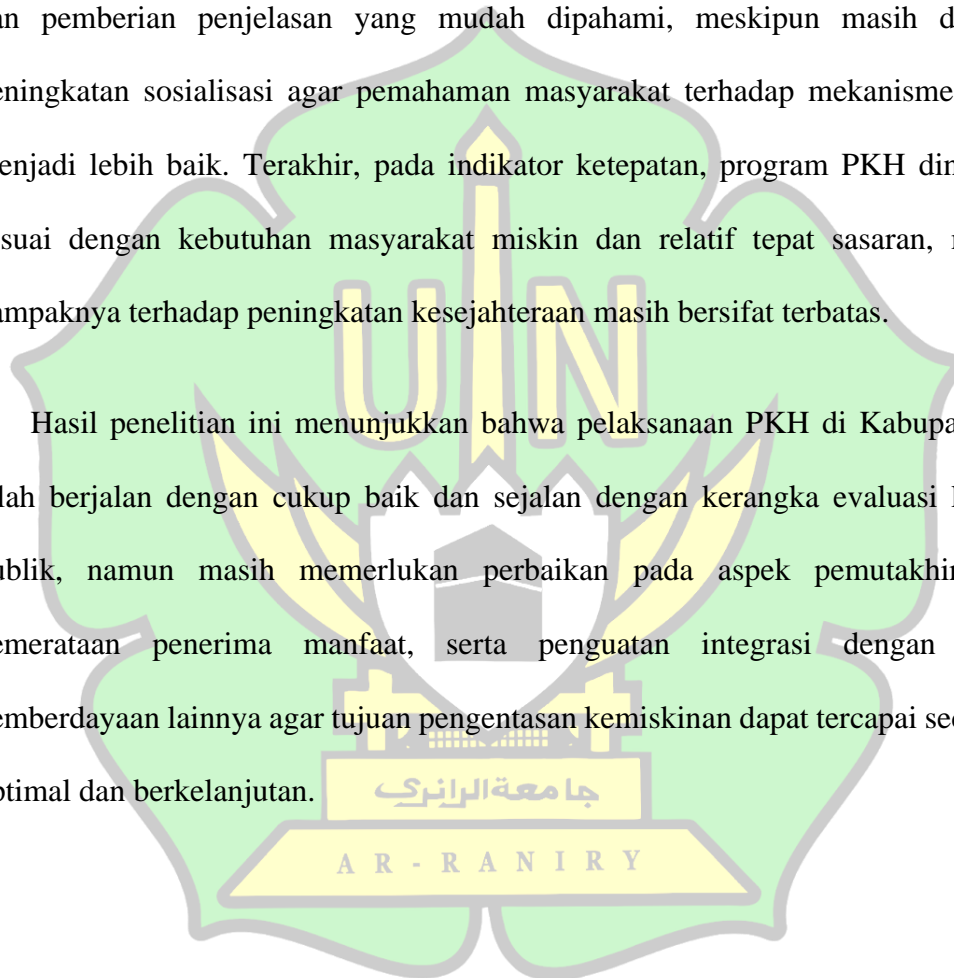
menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan PKH telah mampu mencapai tujuan utamanya, khususnya dalam membantu meringankan beban ekonomi masyarakat miskin serta meningkatkan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, sehingga hal ini mencerminkan tingkat efektivitas program yang cukup baik. Namun demikian, masih ditemukannya masyarakat yang layak menerima bantuan tetapi belum terakomodasi menunjukkan bahwa efektivitas program belum sepenuhnya optimal.

Dari aspek efisiensi, pelaksanaan PKH di Kabupaten Pidie telah berjalan secara relatif efisien, ditandai dengan adanya mekanisme distribusi yang terstruktur mulai dari proses pendataan hingga penyaluran bantuan melalui sistem perbankan, sehingga mampu mempermudah akses masyarakat serta menghemat waktu dan biaya. Meskipun demikian, efisiensi program masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal akurasi data penerima agar tidak terjadi kesalahan dalam penyaluran bantuan. Selanjutnya, pada indikator kecukupan, bantuan PKH telah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing penerima berdasarkan komponen yang dimiliki, namun dalam praktiknya bantuan tersebut belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, sehingga lebih berfungsi sebagai bantuan tambahan dibandingkan sebagai solusi utama dalam mengatasi kemiskinan.

Pada indikator pemerataan, distribusi bantuan PKH dapat dikatakan telah cukup merata karena telah menjangkau sebagian besar masyarakat yang membutuhkan, meskipun masih terdapat kelompok masyarakat yang memenuhi kriteria tetapi belum

menerima bantuan akibat keterbatasan kuota. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek keadilan distribusi belum sepenuhnya tercapai secara optimal. Sementara itu, dari aspek responsivitas, pelaksana program menunjukkan kemampuan yang cukup baik dalam merespon keluhan dan kebutuhan masyarakat melalui keterbukaan informasi dan pemberian penjelasan yang mudah dipahami, meskipun masih diperlukan peningkatan sosialisasi agar pemahaman masyarakat terhadap mekanisme program menjadi lebih baik. Terakhir, pada indikator ketepatan, program PKH dinilai telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat miskin dan relatif tepat sasaran, meskipun dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masih bersifat terbatas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di Kabupaten Pidie telah berjalan dengan cukup baik dan sejalan dengan kerangka evaluasi kebijakan publik, namun masih memerlukan perbaikan pada aspek pemutakhiran data, pemerataan penerima manfaat, serta penguatan integrasi dengan program pemberdayaan lainnya agar tujuan pengentasan kemiskinan dapat tercapai secara lebih optimal dan berkelanjutan.



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai evaluasi penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pidie, dapat disimpulkan bahwa mekanisme distribusi PKH telah berjalan secara sistematis dan cukup baik, dimulai dari proses pendataan, verifikasi, penetapan penerima, hingga penyaluran bantuan melalui rekening bank yang memudahkan akses bagi masyarakat, sehingga mencerminkan aspek efisiensi yang relatif optimal dengan prosedur yang tidak berbelit serta ketepatan waktu pencairan yang cukup terjaga. Dari segi ketepatan sasaran, program ini secara umum telah tepat dalam menjangkau masyarakat miskin yang membutuhkan, yang terlihat dari penilaian masyarakat bahwa bantuan diberikan kepada kelompok yang layak, meskipun masih terdapat sebagian masyarakat yang memenuhi kriteria namun belum terakomodasi akibat keterbatasan kuota dan ketidakakuratan data. Selanjutnya, dari aspek efektivitas, PKH telah mampu mencapai tujuan utamanya dalam membantu meringankan beban ekonomi serta meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, walaupun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Dari segi kecukupan, bantuan yang diberikan telah disesuaikan dengan komponen kebutuhan penerima, namun belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan hidup sehingga lebih berfungsi sebagai bantuan tambahan. Dalam hal pemerataan, distribusi bantuan tergolong cukup merata, tetapi masih menyisakan

ketimpangan bagi masyarakat yang belum terjangkau. Sementara itu, dari aspek responsivitas, pelaksana program menunjukkan sikap yang cukup tanggap terhadap keluhan masyarakat, meskipun masih diperlukan peningkatan sosialisasi agar pemahaman masyarakat terhadap mekanisme program lebih baik. Secara keseluruhan, PKH memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama dalam membantu kebutuhan dasar dan mengurangi beban ekonomi, namun dampaknya belum signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh, sehingga diperlukan perbaikan pada aspek pendataan, pemerataan, dan penguatan pelaksanaan program agar lebih optimal.

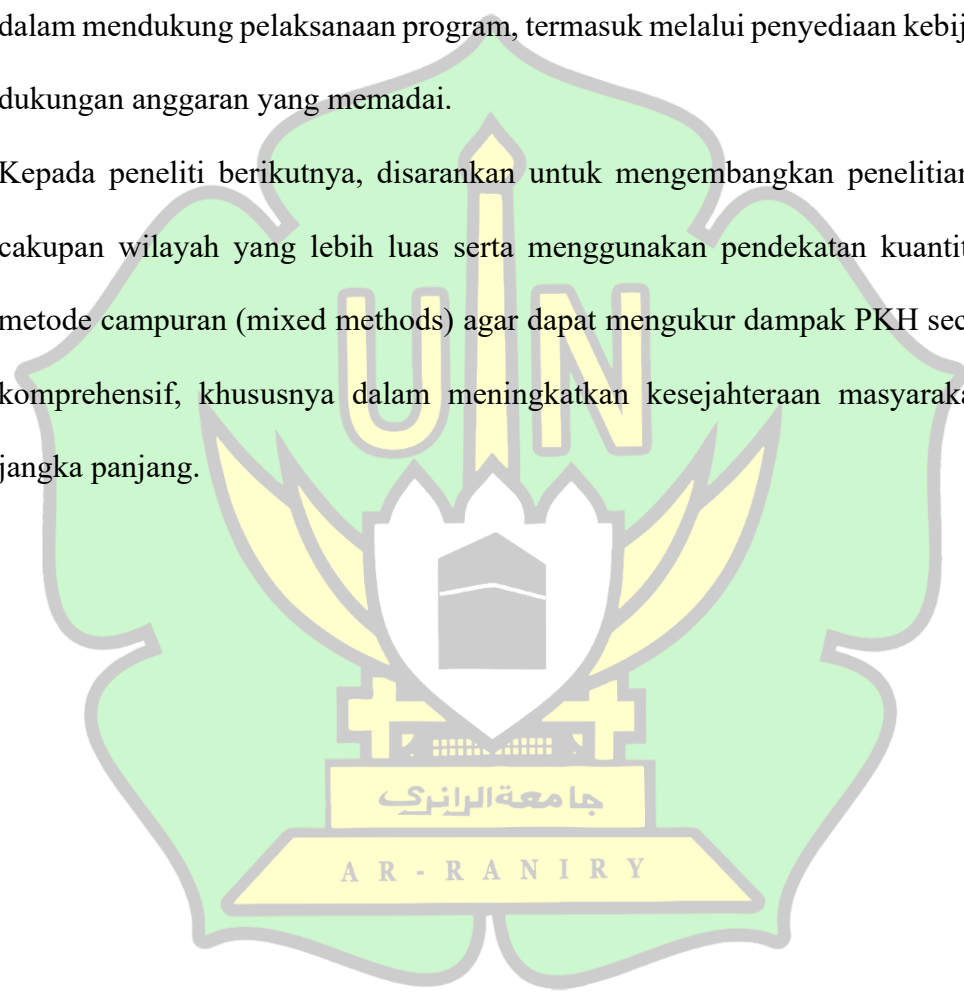
## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Dinas Sosial Kabupaten Pidie, disarankan untuk melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara berkala dan sistematis dengan melibatkan aparatur gampong, sehingga data penerima manfaat menjadi lebih akurat, mutakhir, dan tepat sasaran. Selain itu, Dinas Sosial juga perlu melakukan evaluasi rutin terhadap daftar penerima manfaat serta memperkuat pengawasan dalam proses penyaluran bantuan guna meminimalisir terjadinya kesalahan sasaran.
2. Kepada operator gampong/desa, diharapkan dapat meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat melalui forum pertemuan desa mengenai mekanisme, persyaratan, dan tujuan Program Keluarga Harapan (PKH), serta secara aktif

melakukan verifikasi dan validasi data masyarakat miskin agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kecemburuan sosial.

3. Kepada Pemerintah Daerah, disarankan untuk mengajukan penambahan kuota penerima PKH kepada pemerintah pusat serta memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mendukung pelaksanaan program, termasuk melalui penyediaan kebijakan dan dukungan anggaran yang memadai.
4. Kepada peneliti berikutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian dengan cakupan wilayah yang lebih luas serta menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran (mixed methods) agar dapat mengukur dampak PKH secara lebih komprehensif, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adnin Chiesa Syahwanes, Eli Apud Saepudin, Listia Ulya Madina, Shabna Azzahra, and Ima Muslimah. "Evaluasi Dampak PKH Terhadap Pengurangan Kemiskinan Dan Peningkatan Akses Layanan Sosial Bagi Keluarga Miskin. Analisis Mencakup Efektivitas Pemberian Bantuan Sosial Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat." *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi* 1, no. 2 (2025): 176–83. <https://doi.org/10.63822/j6s5v471>.
- Al, Kasmianti et. "Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Mendukung Program Pengentasan Kemiskinan." *Jurnal Ilmu Pengetahuan* 5, no. 2 (2021): 167–86.
- Amirulkamar, Said. "Bantuan Sosial Menjadi Ketergantungan : Evaluasi Dampak Program Keluarga Harapan Di Kabupaten Pidie Jaya" 8, no. 2 (2025): 686–700.
- Andi, E T, A K Andi, N K Hanafie, and ... "Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Perspektif Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Bagi Keluarga Penerima Manfaat." *Jurnal Education* ... 13, no. 2 (2025): 494–99. <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/6827%0Ahttps://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/download/6827/3736>.
- Asri, Misran. "Pidie Menjadi Pusat VKN LAN Angkatan XXIV, Bawa Pesan Membangun Desa Untuk Pemerataan Ekonomi." PROHABA.CO, 2025. <https://prohaba.tribunnews.com/nanggroe/44893/pidie-menjadi-pusat-vkn-lan-angkatan-xxiv-bawa-pesan-membangun-desa-untuk-pemerataanekonomi>.
- Bappeda pidie. "Kepala Bappeda Pidie H. Isnaini, ST, M. Si Gelar Rakor TKPKD 2024." seputaraceh.id, 2024. <https://seputaraceh.id/2024/09/14/kepala-bappeda-pidie-h-isnaini-st-m-si-gelar-rakor-tpkd-2024/>.
- Dara Angreka Soufyan. "Aceh Dan Tantangan Kemiskinan: Menelaah Peran Pdrb Dan Ipm." *Jurnal Transformasi Administrasi* Volume 15 (2025): 15–31.
- Devi, Meila Yufriana, Yanti Fitria, and Universitas Negeri Padang. "Elementary Education <https://jbasic.org/index.php/basicedu>" 6, no. 1 (2022): 675–83.

- Diputra, I Kadek Dwi Rizky, Komang Adi Sastra Wijaya, and I Dewa Ayu Putri Wirantari. “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Tabanan (Studi Kasus Di Kecamatan Tabanan).” *Socio-Political Communication and Policy Review* 2, no. 4 (2025): 1–14. <https://doi.org/10.61292/shkr.261>.
- Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., M.Si. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by M.Si Dr. Patta Rapanna, SE. Vol. 17. CV. syakir Media Press, 1385.
- Florentina, Maria, Maria Samantha, Deliano Tiara, and Randi Basri Sattu. “Implementasi Kebijakan Program Keluarga” 2, no. 1 (2025): 43–54.
- Hidayati, Nur. “Bappeda Lauching Peta Digital Spasial Kantong Kemiskinan Kabupaten Pidie 2024.” *Serambi News*, 2024. <https://aceh.tribunnews.com/2024/10/14/bappeda-lauching-peta-digital-spasial-kantong-kemiskinan-kabupaten-pidie-2024>.
- Indonesia, Menteri Sosial Republik. “Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018” 3, no. 32 (2018): 1–44.
- Jannati, B, and W Subadi. “Efektifitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Desa Talan Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong.” *Japb* 5 (2022): 542–54. <https://www.jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB/article/view/661%0Ahttps://www.jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB/article/download/661/537>.
- Julfani, Listy, and Ilham Mirzaya Putra. “Dampak Program Keluarga Harapan ( PKH ) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Miskin Di Kelurahan Kerasaan I Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun” 6, no. 1 (2023): 42–58. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i1.270>.
- Madaliyah, Mihda, and Syifa Rohmah. “Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia.” *Jurnal Sahmiyya* 3, no. 1 (2024): 24–44.
- Mandarlangi, Megawati A., Intam Kurnia, and M. Nur Alamsyah. “Evaluasi Kebijakan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Di Kabupaten Parigi Moutong.” *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 5, no. 3 (2024): 548–60. <https://jurnal.syntaximperatif.co.id/index.php/syntax-imperatif/article/view/442>.

- Marsitadewi, Komang Ema, and I Wayan Sudemen. "Pola Intervensi Pemerintah Melalui Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora* 9, no. 1 (2025): 68–77.
- Martins, Elza Kamali, and Nelsia Tomalsia Toletina. "Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Program KIP-K Di Indonesia." *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik* 11, no. 1 (2024): 331–40. <https://doi.org/10.37676/professional.v11i1.6166>.
- Nur Aeda, and Riadul Jannah. "Implementasi Dan Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. Studi Di Desa Kekait Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat." *Journal of Economics and Business* 8, no. 1 (2022): 165–86. <https://doi.org/10.29303/ekonobis.v8i1.98>.
- Pakaya, Putri Agustin, Tety Thalib, and Andi Yusuf Katili. "Mekanisme Pendataan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Biawu Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo." *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 2793–2800.
- Safitri, Defi Nur, Ahmad Suprastiyo, and Cahya Lukito. "Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Peningkatan Taraf Pendidikan Di Desa Ngadirejo Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban." *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara* 5, no. 2 (2021): 1.
- Sari, rati julia pita, Tri Purwanti, and Ovita Charolina. "Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Penyaluran Bantuan Keluarga Harapan ( Pkh )." *Stia Bengkulu* 2, no. 2 (2023): 179–86.
- Sinurat, Ronaldo Putra Pratama. "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia." *Jurnal Registratie* 5, no. 2 (2023): 87–103. <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v5i2.3554>.
- Wahyuni, Winny, Raden Dwiarto, Ronida S Suwarno, and Bambang Giyanto. "Evaluasi Kebijakan Perlindungan Sosial Dan Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan (PKH)." *Jurnal Pembangunan Dan Administrasi Publik* 5, no. 2 Aceh, Badan Pusat Statistik Provinsi. "Jumlah Penduduk Aceh Berdasarkan Kabupaten/Kota," 2025. <https://data.acehprov.go.id/dataset/74bea426-69aa-4a63-a474-2d4962dff34f/resource/7add250f-8a85-4f67-9f9a-f7d84570b775/download/jumlah-pendudukribu-menurut-kabupatenkota-di-provinsi->

aceh.csv.

- Adnin Chiesa Syahwanes, Eli Apud Saepudin, Listia Ulya Madina, Shabna Azzahra, and Ima Muslimah. "Evaluasi Dampak PKH Terhadap Pengurangan Kemiskinan Dan Peningkatan Akses Layanan Sosial Bagi Keluarga Miskin. Analisis Mencakup Efektivitas Pemberian Bantuan Sosial Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat." *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi* 1, no. 2 (2025): 176–83. <https://doi.org/10.63822/j6s5v471>.
- Al, Kasmianti et. "EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENDUKUNG PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN." *Jurnal Ilmu Pengetahuan* 5, no. 2 (2021): 167–86.
- Amirulkamar, Said. "Bantuan Sosial Menjadi Ketergantungan : Evaluasi Dampak Program Keluarga Harapan Di Kabupaten Pidie Jaya" 8, no. 2 (2025): 686–700.
- Andi, E T, A K Andi, N K Hanafie, and ... "Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Perspektif Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Bagi Keluarga Penerima Manfaat." *Jurnal Education ...* 13, no. 2 (2025): 494–99.
- Anggraeni, Ayuni Putri, and Alih Aji Nugroho. "EVALUASI KEBIJAKAN PKH ( PROGRAM KELUARGA HARAPAN ) DI INDONESIA" 4, no. 2 (2022): 39–54.
- Asri, Misran. "Pidie Menjadi Pusat VKN LAN Angkatan XXIV, Bawa Pesan Membangun Desa Untuk Pemerataan Ekonomi." PROHABA.CO, 2025.
- Bappeda pidie. "Kepala Bappeda Pidie H. Isnaini, ST, M. Si Gelar Rakor TKPKD 2024." [seputaraceh.id](http://seputaraceh.id), 2024.
- Dara Angreka Soufyan. "ACEH DAN TANTANGAN KEMISKINAN: MENELAHAH PERAN PDRB DAN IPM." *JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI* VOLUME 15 (2025): 15–31.
- Devi, Meila Yufriana, Yanti Fitria, and Universitas Negeri Padang. "Elementary Education [Https://Jbasic.Org/Index.Php/Basicedu](https://Jbasic.Org/Index.Php/Basicedu)" 6, no. 1 (2022): 675–83.
- Diputra, I Kadek Dwi Rizky, Komang Adi Sastra Wijaya, and I Dewa Ayu Putri Wirantari. "Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Tabanan (Studi Kasus Di Kecamatan

- Tabanan).” *Socio-Political Communication and Policy Review* 2, no. 4 (2025): 1–14.  
<https://doi.org/10.61292/shkr.261>.
- Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., M.Si. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by M.Si Dr. Patta Rapanna, SE. Vol. 17. CV. syakir Media Press, 1385.
- Florentina, Maria, Maria Samantha, Deliano Tiara, and Randi Basri Sattu. “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA” 2, no. 1 (2025): 43–54.
- Hidayati, Nur. “Bappeda Lauching Peta Digital Spasial Kantong Kemiskinan Kabupaten Pidie 2024.” *Serambi News*, 2024.
- Indonesia, Menteri Sosial Republik. “PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018” 3, no. 32 (2018): 1–44.
- Jannati, B, and W Subadi. “Efektifitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Desa Talan Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong.” *Japb* 5 (2022): 542–54.
- Julfani, Listy, and Ilham Mirzaya Putra. “Dampak Program Keluarga Harapan ( PKH ) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Miskin Di Kelurahan Kerasaan I Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun” 6, no. 1 (2023): 42–58.  
<https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i1.270>.
- Madaliyah, Mihda, and Syifa Rohmah. “Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia.” *Jurnal Sahmiyya* 3, no. 1 (2024): 24–44.
- Mandarlangi, Megawati A., Intam Kurnia, and M. Nur Alamsyah. “Evaluasi Kebijakan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Di Kabupaten Parigi Moutong.” *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 5, no. 3 (2024): 548–60.
- Marsitadewi, Komang Ema, and I Wayan Sudemen. “Pola Intervensi Pemerintah Melalui Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia.” *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora* 9, no. 1 (2025): 68–77.
- Martins, Elza Kamali, and Nelsia Tomalsia Toletina. “Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Program KIP-K Di Indonesia.” *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik* 11, no. 1 (2024): 331–40. <https://doi.org/10.37676/professional.v11i1.6166>.

- Nur Aeda, and Riadul Jannah. "Implementasi Dan Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. Studi Di Desa Kekait Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat." *Journal of Economics and Business* 8, no. 1 (2022): 165–86. <https://doi.org/10.29303/ekonobis.v8i1.98>.
- Pakaya, Putri Agustin, Tety Thalib, and Andi Yusuf Katili. "Mekanisme Pendataan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Biawu Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo." *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 2793–2800.
- Rafinda, Ii, and Ellies Sukmawati. "EVALUASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DENGAN LOGIC MODEL DI DESA KADUDAMPIT , KABUPATEN SUKABUMI ," 6 (2023): 43–63.
- Safitri, Defi Nur, Ahmad Suprastiyo, and Cahya Lukito. "IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM PENINGKATAN TARAF PENDIDIKAN DI DESA NGADIREJO KECAMATAN RENGEL KABUPATEN TUBAN." *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara* 5, no. 2 (2021): 1.
- Sari, rati julia pita, Tri Purwanti, and Ovita Charolina. "Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Penyaluran Bantuan Keluarga Harapan ( Pkh )." *Stia Bengkulu* 2, no. 2 (2023): 179–86.
- Sinurat, Ronaldo Putra Pratama. "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia." *Jurnal Registratie* 5, no. 2 (2023): 87–103. <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v5i2.3554>.
- Wahyuni, Winny, Raden Dwiarto, Ronida S Suwarno, and Bambang Giyanto. "Evaluasi Kebijakan Perlindungan Sosial Dan Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan (PKH)." *Jurnal Pembangunan Dan Administrasi Publik* 5, no. 2 (2023): 11–22.
- Yahya, MHD. Rafi, and Ilham Yuri Nanda Nanda. "Evaluasi Program Bantual Sosial Tunai (BST) Pada Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus; Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar)." *SUMUR- Jurnal Sosial Humaniora* 3, no. 1 (2025): 27–34. <https://doi.org/10.58794/sumur.v3i1.1341>.

Zakirin, Muhammad, and Jauhar Arifin. "Evaluasi Kebijakan Dilihat Dari Aspek Dampak Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Hayaping Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur." *Jurnal Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis* 5, no. 1 (2022): 256–71.

Widyaningsih, Dyan, (2022) '*Mendorong Pemutakhiran Berkelanjutan terhadap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.*' SMERU Working Paper No. 1. Jakarta: The SMERU Research Institute.

Sari, L., Sugianor, & Munawarah. (2025). *Evaluasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pengentasan kemiskinan di Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara* (Studi kasus Desa Hambuku Lima dan Desa Sungai Durait Hulu). *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol.2, No. 1.



## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran 1 Surat Keputusan Pembimbing



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor: 3078/Un.08/FISIP/Kp.07.6/12/2025**

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL**  
**DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
  - b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu pemerintahan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022, tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 statuta UIN Ar-Raniry banda Aceh ;
  8. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2022 tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
  9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag RI;
  10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
  11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-50/PB/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
  12. DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 025.04.2.423925/2025, Tanggal 02 Desember 2024.
- Memperhatikan** :
- Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **05 November 2025**
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
- KESATU** :
- Menunjuk dan mengangkat Saudara :
1. **Ferry Setiawan, S.E., Ak., M.Si.** Sebagai pembimbing I
  2. **Zakki Fuad Khalil, M.Si.** Sebagai pembimbing II
- Untuk membimbing skripsi :
- Nama : **Zahira Saffa**
- NIM : **220802095**
- Program Studi : **Ilmu Administrasi Negara**
- Judul : **Evaluasi Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Masyarakat Berdampak Kemiskinan di Kabupaten Pidie**
- KEDUA** :
- Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** :
- Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.



- Tembusan:**
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh,
  2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara,
  3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan,
  4. Yang bersangkutan.

## Lampiran 2 Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : B-91/Un.08/FISIP.I.05/01/2026

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Dinas sosial kabupaten Pidie

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220802095

Nama : ZAHIRA SAFFA

Program Studi/Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Alamat : Sigli-Kembang Tanjung Tgk Di Punoh Aron kuta baro

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **EVALUASI PENYALURAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)UNTUK MASYARAKAT BERDAMPAK KEMISKINAN DI KABUPATEN PIDIE**

Banda Aceh, 22 Januari 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Berlaku sampai : 29 Mei 2026

Eka Januar, M.Soc.Sc.

NIP. 198401012015031003

Lampiran 3 Dokumentasi





